



DUKCAPIL JAKARTA

2025

LAPORAN EVALUASI

PERJANJIAN KINERJA

SEMESTER I

Jl. Letjen S. Parman No.7
Tomang, Kec. Grogol petamburan,
Kota Jakarta Barat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta



@dukcapiljakarta



LAPORAN EVALUASI PERJANJIAN KINERJA SEMESTER I TAHUN 2025



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI DKI JAKARTA

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Evaluasi Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta merupakan tindak lanjut Peraturan Menpan RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Laporan Evaluasi Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta yang disusun ini merupakan gambaran capaian kinerja Para Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kinerja Semester I Tahun 2025.

Laporan ini diharapkan bermanfaat dan dapat meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan segala kritik serta saran sangat diharapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan ini dimasa yang akan datang.

Jakarta, Juli 2025

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta,



Denny Wahyu Haryanto
NIP. 197112041991011001

DAFTAR ISI

COVER i

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI... ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR..... iv

PENDAHUL UAN..... 1

A. Penjelasan Umum 1

B. Maksud dan Tujuan 3

C. Ruang Lingkup Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3

D. Metodologi..... 3

E. Data dan Analisis..... 4

E.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Strategis
Per Semester 4

a. Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk..... 7

b. Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan..... 8

E.2 Permasalahan Perencanaan dan Pengukuran Perjanjian Kinerja
Perangkat Daerah Semester II Tahun 2024 10

E.3 Identifikasi Kesesuaian Polarisasi dan Analisis Sebaran Trajektori
Target Indikator Tahun Berjalan 11

E.3.1 Identifikasi Kesesuaian Polarisasi 11

E.3.2 Analisis Sebaran Trajektori Target Indikator Tahun Berjalan 12

E.4 Analisis Korelasi Capaian Kinerja Indikator dan Serapan Anggaran.. 20

E.4.1 Korelasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan
dan Serapan Anggaran.... 20

F.Kesimpulan dan Tindak Lanjut Rencana Perbaikan Kualitas Kinerja..... 20

F.1 Kesimpulan 22

F.2 Tindak Lanjut Rencana Perbaikan Kualitas Kinerja... 22

LAMPIRAN 37

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Pedoman Kriteria Kinerja 4

Tabel 2. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun 2025..... 5

Tabel 3. Realisasi IKM Triwulan I Tahun 2025..... 7

Tabel 4. Realisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk Semester I (Triwulan II) Tahun 2025 9

Tabel 5. Capaian Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Triwulan II Tahun 2025 9

Tabel 6. Capaian Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Triwulan II Tahun 2025..... 9

Tabel 7. Rekapitulasi Permasalahan Perencanaan dan Pengukuran Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2025 10

Tabel 8. Identifikasi Polarisasi level Kinerja Tahun 2024 dan 2025 8

Tabel 9. Rincian Identifikasi Polarisasi Level Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan 2025 10

Tabel 10. Korelasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Serapan Anggaran Semester I Tahun 2025 12

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. IKM Dinas Dukcapil per Triwulan pada Tahun 2025.....8

Gambar 2. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan 2025.5

Gambar 3. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 dan 2025 5

Gambar 4. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dan 2025 5

Gambar 5. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dan 2025.....5

Gambar 6. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 dan 2025 5

Gambar 7. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dan 2025 5

Gambar 8. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 dan 2025 5

Gambar 9. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (UPTIK) Tahun 2024 dan 2025.....5

Gambar 10. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan (UPAK) Tahun 2024 dan 2025 5

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum

Evaluasi perjanjian kinerja Perangkat Daerah dilakukan untuk mengetahui kualitas manajemen kinerja perangkat daerah beserta capaian kinerja dan kontribusi perangkat daerah terhadap kinerja pembangunan Provinsi DKI Jakarta serta potret kinerja pejabat. Kualitas manajemen kinerja perangkat daerah yang dimaksud disini dibatasi pada penilaian kualitatif terhadap kualitas matrik cascading perangkat daerah dan kedisiplinan perangkat daerah dalam melakukan perencanaan dan pengukuran kinerja secara valid setiap semester. Sedangkan capaian kinerja perangkat daerah merupakan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja yang ditetapkan, lalu dilakukan juga perbandingan realisasi dengan kondisi kinerja tahun sebelumnya (N-1) untuk melihat kestabilan pencapaian kinerja. Potret kinerja pejabat dievaluasi melalui pencapaian target perjanjian kinerja masing-masing pejabat dan dibandingkan proporsi antara yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target. Dari sini diharapkan dapat diidentifikasi apakah terdapat kelemahan dalam penentuan target atau kinerja pejabat bersangkutan perlu dievaluasi.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan layanan kependudukan yang akurat, cepat, dan terpercaya. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Dinas Dukcapil menyusun kerangka logis cascading kinerja yang dimulai dari tujuan strategis hingga ke indikator-indikator operasional.

1. Tujuan Strategis

Dinas Dukcapil bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas guna mendukung tata pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta menjamin hak warga negara atas dokumen kependudukan.

2. Program Prioritas

Untuk mencapai tujuan tersebut, Dinas Dukcapil melaksanakan beberapa program utama, antara lain:

- Program Pendaftaran Penduduk.
- Program Pencatatan Sipil.
- Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
- Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

3. Kegiatan Prioritas

Masing-masing program tersebut diterjemahkan menjadi kegiatan-kegiatan kunci yang spesifik, seperti:

- Pelaksanaan pendaftaran penduduk baru dan perekaman data elektronik.
- Penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, KK, dan akta kelahiran.
- Pengelolaan data dan profil kependudukan untuk kebutuhan perencanaan dan pelayanan publik.

- Pemeliharaan sistem teknologi informasi yang mendukung proses administrasi kependudukan.
- Pelayanan aktif dan responsif kepada masyarakat.

4. Indikator Kinerja

Setiap kegiatan kunci diukur menggunakan indikator kinerja yang spesifik dan terukur, misalnya:

- Persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan (KTP, KK).
- Waktu penyelesaian layanan administrasi.
- Tingkat akurasi dan kevalidan data kependudukan.
- Indeks kepuasan layanan masyarakat.
- Rasio realisasi anggaran terhadap target.

5. Output dan Outcome

Dengan pengelolaan kegiatan dan indikator yang sistematis, Dinas Dukcapil diharapkan dapat menghasilkan output berupa peningkatan jumlah dokumen kependudukan yang valid dan tepat waktu. Outcome jangka panjangnya adalah terwujudnya pelayanan publik yang efisien, data kependudukan yang terpercaya sebagai dasar kebijakan pemerintah, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.

6. Pengukuran dan Evaluasi Berkala

Kerangka logis ini juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan sesuai rencana, dan hasilnya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta dapat dijadikan dasar perbaikan kinerja.

Memasuki tahun 2025, Dinas Dukcapil DKI Jakarta telah menetapkan target-target kinerja yang berfokus pada peningkatan kualitas layanan dan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan. Berdasarkan matriks kinerja, berikut adalah gambaran target utama untuk Semester 1 (Januari - Juni 2025):

Fokus utama pada semester pertama adalah menjaga dan meningkatkan kepuasan masyarakat serta memastikan kelengkapan dokumen adminduk bagi warga.

- **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):** Kualitas layanan menjadi prioritas utama. Target IKM untuk **Layanan Adminduk** dipatok sebesar **99.0** pada Triwulan I dan diharapkan meningkat menjadi **99.30** pada akhir Triwulan II (Juni 2025). Ini menunjukkan komitmen untuk terus memberikan pelayanan yang prima dan responsif.
- **Kepemilikan Dokumen Kependudukan:** Target **Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan** secara keseluruhan diharapkan mencapai **99.46%** pada Triwulan I dan naik menjadi **99.66%** pada akhir Semester 1. Pencapaian target ini, yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Dukcapil, krusial untuk memastikan tertib administrasi di tingkat provinsi.

Kedua indikator utama tersebut menjadi tolok ukur keberhasilan Dinas Dukcapil dalam menjalankan fungsi pelayanan dasarnya kepada

masyarakat di paruh pertama tahun 2025, yang pada akhirnya berkontribusi pada pencapaian target tahunan sebesar 99.80 untuk IKM dan 99.96% untuk kepemilikan dokumen.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dari pelaksanaan evaluasi perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah melalui pemahaman terhadap kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja sehingga menjadi masukan penyempurnaan perencanaan kedepan serta meningkatkan kinerja organisasi.

Sedangkan tujuan dari evaluasi perjanjian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Memahami perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Mengetahui kualitas cascading kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, minimal secara telaah cepat (*quick assessment*). Kualitas cascading kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dinilai dari kausalitas antar sasaran dan indikator kinerja dari level tertinggi sampai level terendah, kualitas sasaran dan indikator, target, trajektori target, pemilihan konsolidasi periode dan polarisasi target yang tepat;
3. Mengetahui capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari proses pemantauan kinerja organisasi; dan
4. Menjadi bahan masukan bagi peningkatan manajemen kinerja perangkat daerah khususnya aspek perencanaan dan pengukuran kinerja tahun berikutnya.

C. Ruang Lingkup Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Ruang lingkup evaluasi perjanjian kinerja terdiri dari:

1. Evaluasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan sasaran strategis sebagai dasar penilaian kinerja organisasi;
2. Evaluasi capaian kinerja indikator dan serapan anggaran tahunan dengan melihat indikator kinerja utama (IKU), indikator program, dan indikator kegiatan/sub kegiatan;
3. Evaluasi perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tahun berjalan berupa evaluasi kualitas sasaran dan indikator kinerja, target, trajektori target, konsolidasi periode, dan polarisasi target kinerja; dan
4. Perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tahun berikutnya.

D. Metodologi

Evaluasi perjanjian kinerja Perangkat Daerah menggunakan data dari Sistem Informasi Monitoring Evaluasi (Monev) kinerja. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan metode kompilasi dan perhitungan data, kemudian disajikan dalam bentuk tabel dan grafik rekapitulasi. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan metode *gap analysis* yaitu

membandingkan realisasi dengan target yang telah ditetapkan. Kriteria penilaian capaian indikator kinerja menggunakan tabel yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 dengan penyesuaian untuk kebutuhan evaluasi pada tabel sebagai berikut.

Tabel 1. Pedoman Kriteria Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Baik

E. Data dan Analisis

E.1 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Strategis Per Semester

Penyajian capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) yang dijadikan sebagai kinerja tiap semester dijelaskan pada tabel 2 berikut :

Tabel 2. Capaian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Semester I Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata Indikator	Target TW 2	Realisasi TW 2	Satuan	Capaian	Kualitas IKU		Nilai Bobot Kualitas IKU	Bobot IKU Tertimbang	Nilai Kinerja Perangkat Daerah Tertimbang	Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Tipe Cascading****)
								Validitas	Kendali					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dengan memilih jawaban yang merupakan indikator dari nilai kepuasan (sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju dan sangat setuju). Kemudian penilaian dari responden tersebut akan dikonversi dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00.	99,35	99,97	Indeks	100.62%	Exact (E)	Moderate (M)	21,00%	100,00%	100,62%	100,62%	Indirect

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata Indikator	Target TW 2	Realisasi TW 2	Satuan	Capaian	Kualitas IKU		Nilai Bobot Kualitas IKU	Bobot IKU Tertimbang	Nilai Kinerja Perangkat Daerah Tertimbang	Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Tipe Cascading****)
								Validitas	Kendali					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	a. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk : KTP-el, KK, KIA (Jumlah kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk/ jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pendaftaran penduduk x 100%) b. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil : Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian (Jumlah kepemilikan dokumen pencatatan sipil / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen pencatatan sipil x 100%) Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan = (Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk + Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil) / 2	99,36	99,76	Persen	100.40%	Exact (E)	Moderate (M)	21,00%	100,00%	100,40%	100,40%	Indirect
Capaian Kinerja Perangkat Daerah													100,40%	
Predikat Kinerja													Mencapai Target	

Sumber: Sistem Informasi Monev Kinerja Tahun 2025, diolah

Pada tabel diatas dapat disimpulkan jika semua target sasaran strategis yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025 telah tercapai, dengan rincian sebagai berikut:

Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk

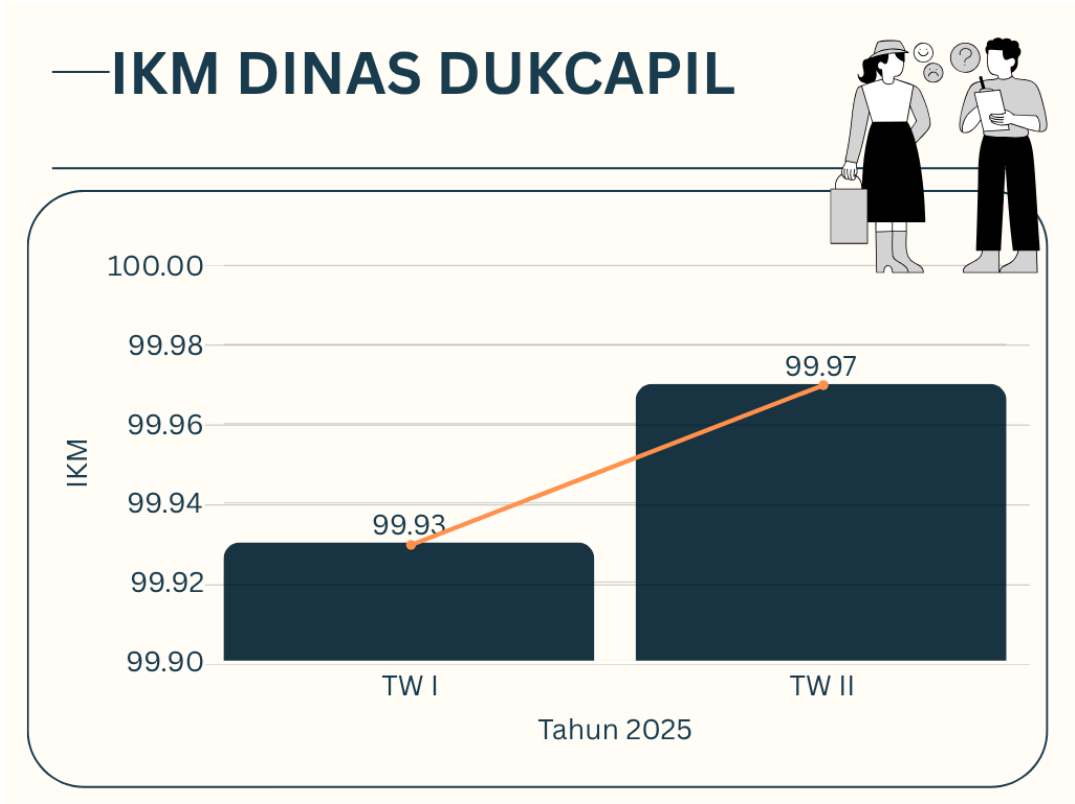
Target tahun 2025 sebesar 99,95 Indeks, dengan target pada triwulan II sebesar 99,35 Indeks telah tercapai dengan nilai realiasi sebesar 99,97 Indeks (capaian 100,62%). IKU ini memakai validitas *exact* dikarenakan dapat menggambarkan tingkat kepuasan apabila survei dilakukan dengan metodologi yang tepat untuk merepresentasikan kepuasan pengguna layanan. Tingkat kendali *moderate* karena pencapaian IKU ini dipengaruhi secara berimbang oleh pemilik IKU atau pemberi layanan dan persepsi penerima layanan atas layanan yang telah diterima.

Tabel 3. Realisasi IKM Triwulan II Tahun 2025

INDIKATOR	VARIABEL	NILAI KEPUASAN VARIABEL TW IV
(1)	(2)	(3)
PERSYARATAN PELAYANAN	Persyaratan pelayanan mudah dipahami oleh masyarakat dan sudah sesuai dengan yang di informasikan	99,98
SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Prosedur dalam mengajukan permohonan layanan administrasi kependudukan cukup mudah dipahami	99,97
WAKTU PELAYANAN	Waktu penyelesaian dokumen cukup cepat dan sesuai dengan yang dijanjikan	99,99
BIAYA	Seluruh layanan administrasi kependudukan gratis dan tidak dipungut biaya sama sekali dengan pengurusan dokumen kependudukan	99,99
SPESIFIKASI PRODUK LAYANAN	Produk layanan yang diberikan sudah sesuai dengan yang tercantum dalam standar pelayanan	99,96
KOMPETENSI PELAKSANA	Petugas Dukcapil mempunyai kompetensi dan kemampuan dalam memberikan pelayanan	99,96
PERILAKU PELAKSANA	Petugas Dukcapil mampu memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada masyarakat	99,99
PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	Penanganan pengaduan yang disampaikan sudah cukup baik	99,94
SARANA DAN PRASARANA	Kualitas sarana kerja (komputer/printer/alat perekam KTP) di loket layanan Dukcapil sudah sangat baik	99,93
NILAI AKHIR		99, 97

Jumlah responden SKM pada triwulan II tahun 2025 sebanyak 14.228 responden dengan rincian responden Dukcapil Kelurahan sebanyak 12.787 responden, responden Dukcapil Kecamatan sebanyak 856 responden,

responden Dukcapil Sudin sebanyak 461, serta responden Dukcapil UPAK sebanyak 124 responden. Terdapat kenaikan indeks sebesar 0,04 dari hasil SKM Triwulan I yang nilai realisasinya sebesar 99,93 Indeks. Berikut Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta selama Tahun 2025.



Gambar. 1 IKM Dinas Dukcapil per Triwulan pada Tahun 2025

Dalam pencapaian indikator ini, didukung oleh beberapa hal antara lain:

- Pelaksanaan monitoring penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terhadap penerapan SP dan SOP pada unit-unit / loket pelayanan;
- Adanya bimbingan teknis pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil terkait pelayanan serta penanganan keluhan
- Dilakukan tindaklanjut serta pemantauan atas permasalahan layanan administrasi kependudukan
- Tersedianya informasi pelayanan dan wadah pengaduan terkait pelayanan secara digital

Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan

Target tahun 2025 sebesar 99,96% dengan target pada triwulan II sebesar 99,36% dan realisasi sebesar 99,76% (capaian 100,40%). IKU ini memakai validitas *exact* dikarenakan dapat menggambarkan presentase jumlah kepemilikan dokumen administrasi kependudukan. Tingkat kendali *moderate* karena pencapaian IKU ini dipengaruhi secara berimbang antara pihak pemilik IKU atau pemberi layanan yang menerbitkan dokumen administrasi kependudukan dengan pihak penerima layanan atau yang mendaftarkan dokumen administrasi kependudukan nya.

Tabel 4. Realisasi Cakupan Kepemilikan Dokumen Admindak Dinas Dukcapil Semester I (Triwulan II) Tahun 2025

No	Dokumen	Target	Realisasi	%	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	KTP-el	8.115.838	8.108.222	99,91%	
2	KIA	2.922.378	2.890.758	98,92%	
3	Akta kelahiran	3.083.311	3.075.962	99,76%	
4	Akta Kematian	21.569	21.569	100,00%	
5	Akta Perkawinan	1.768	1.768	100,00%	
6	Akta Perceraian	217	217	100,00%	
	Rata-rata			99,76%	

Tabel 5. Capaian Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk pada Triwulan II Tahun 2025

NO	NAMA_KAB	CAKUPAN KEPEMILIKAN KIA			CAKUPAN PEREKAMAN KTP EL			CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN DAFDUK TW II TAHUN 2025
		JUMLAH PENDUDUK USIA 0-16TH	KEPEMILIKAN KIA SETELAH DIKURANGI YANG TIDAK AKTIF DAN PINDAH DAN TL COKLIT	%	JUMLAH PENDUDUK USIA WK	JUMLAH PEREKAMAN KTP EL SETELAH DIKURANGI YANG TIDAK AKTIF, PINDAH DAN TL COKLIT	%	
1	ADM. KEP 1000	9.442	9.442	100,00%	20.892	20.892	100,00%	100,00%
2	JAKARTA PUSAT	262.582	262.258	99,88%	794.688	794.553	99,98%	99,93%
3	JAKARTA UTARA	502.169	496.472	98,87%	1.329.863	1.328.627	99,91%	99,39%
4	JAKARTA BARAT	674.665	669.974	99,30%	1.882.087	1.880.233	99,90%	99,60%
5	JAKARTA SELATAN	601.679	594.550	98,82%	1.729.732	1.728.157	99,91%	99,36%
6	JAKARTA TIMUR	871.841	858.062	98,42%	2.358.576	2.355.760	99,88%	99,15%
PROV. DKI JAKARTA		2.922.378	2.890.758	98,92%	8.115.838	8.108.222	99,91%	99,41%

Tabel 6. Capaian Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Triwulan IV pada Tahun 2024 per tanggal 13 Desember 2024

NO.	NAMA_KEL	CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN CAPIL TW II TAHUN 2025
		JUMLAH PENDUDUK USIA 0 - 17 TAHUN	JML KEPEMILIKAN AKTA LAHIR SETELAH DIKURANGI YANG TIDAK AKTIF, PINDAH DAN TL COKLIT	%	KPI AKTA KEMATIAN TRIWULAN II TAHUN 2025		%	KPI AKTA PERKAWINAN TRIWULAN II TAHUN 2025		%	KPI AKTA PERCERAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025		%	
					LAPOR MATI	TOTAL AKTA KEMATIAN		JML AKTA KAWIN	JML PEMOHON		JML AKTA CERAI	JML PEMOHON		
1	ADM. KEP 1000	9.921	9.921	100,00%	61	61	100,00%	-	-	100,00%	1	1	100,00%	100,00%
2	JAKARTA PUSAT	277.488	277.432	99,98%	2.550	2.550	100,00%	139	139	100,00%	18	18	100,00%	99,99%
3	JAKARTA UTARA	527.127	526.116	99,81%	3.291	3.291	100,00%	475	475	100,00%	58	58	100,00%	99,95%
4	JAKARTA BARAT	711.325	710.449	99,88%	4.215	4.215	100,00%	549	549	100,00%	78	78	100,00%	99,97%
5	JAKARTA SELATAN	637.324	635.242	99,67%	4.774	4.774	100,00%	184	184	100,00%	18	18	100,00%	99,92%
6	JAKARTA TIMUR	920.126	916.802	99,64%	6.678	6.678	100,00%	421	421	100,00%	44	44	100,00%	99,91%
PROVINSI DKI JAKARTA		3.083.311	3.075.962	99,76%	21.569	21.569	100,00%	1.768	1.768	100,00%	217	217	100,00%	99,94%

Beberapa hal pendorong tercapainya indikator ini dikarenakan semakin pedulinya masyarakat Provinsi DKI Jakarta atas pentingnya identitas serta legalitas diri, hal ini juga didukung dengan beberapa kegiatan yang membantu meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, diantaranya :

- Pelayanan jemput bola bagi warga lansia, orang sakit dan disabilitas
- Pelayanan jemput bola perekaman KTP usia 16 tahun pada Sekolah Menengah Atas/Sederajat
- Pelayanan Rabu Petang yang per Mei 2025 menjadi Jumat Petang, dilakukan di semua unit / loket pelayanan dukcapil
- Pelayanan adminduk penduduk non permanen dan rentan bagi Warga Binaan Sosial (WBS) di Yayasan/Panti Sosial
- Adanya pelayanan adminduk yang dapat dilakukan secara daring (*online*)

E.2 Permasalahan Perencanaan dan Pengukuran Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2025

Berikut tersaji data inventarisasi permasalahan yang ditemukan berdasarkan capaian IKU pada tabel 2 :

Tabel 7. Rekapitulasi Permasalahan Perencanaan dan Pengukuran Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Semester I Tahun 2025

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk	100,62%	• Realisasi telah melebihi target yang telah ditentukan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan SKM dilakukan secara berkala dan dilakukan perbaikan / tindak lanjut atas unsur-unsur dengan nilai terendah dan juga atas saran/kritik serta pengaduan yang masuk atas layanan tersebut. Telah dilakukan monitoring terhadap loket-loket pelayanan.
2	Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	100,40%	• Realisasi telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. • Hal tersebut didorong oleh berbagai upaya yang telah dilakukan Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta, antara lain: 1) Melakukan pelayanan Rabu petang yang telah diubah menjadi Jumat Petang per Mei 2025, 2) Melakukan pelayanan daring (<i>online</i>), 3) Melakukan pelayanan adminduk secara mobile

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				ke Sekolah/Pos RT/RW/ Event tertentu/ Jemput Bola Diasabilitas dan Lansia.

E.3 Identifikasi Kesesuaian Polarisasi dan Analisis Sebaran Trajektori Target Indikator Tahun Berjalan

E.3.1 Identifikasi Kesesuaian Polarisasi

Berikut identifikasi polarisasi pada Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di seluruh level kinerja yang disusun dan diinput ke dalam sistem informasi monev kinerja sebagaimana terlampir pada Tabel 8

Tabel 8. Identifikasi Polarisasi Level Kinerja Tahun 2024 dan 2025

Level Kinerja	Polarisasi					
	2024			2025		
	Benar	Salah	Presentase Benar	Benar	Salah	Presentase Benar
(1)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
Tujuan Sasaran	2	0	100%	2	0	100%
Program	5	0	100%	5	0	100%
Kegiatan	84	0	100%	95	0	100%
Subkegiatan	169	0	100%	188	0	100%
Total	260	0	100%	290	0	100%

Sumber : Sistem Informasi Monev Kinerja Tahun 2024 dan 2025, diolah

Dengan rincian polarisasi sebagai berikut :

Tabel 9. Rincian Identifikasi Polarisasi Level Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan 2025

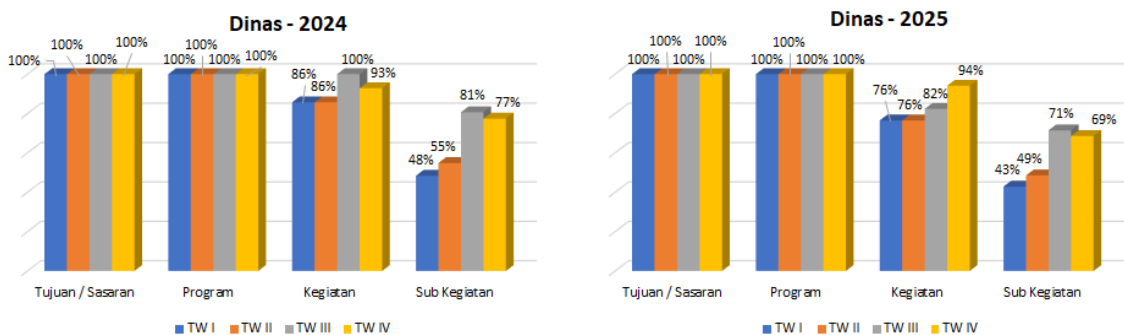
Level Kinerja	Polarisasi					
	2024			2025		
	Benar	Salah	Presentase Benar	Benar	Salah	Presentase Benar
(1)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
Tujuan Sasaran						
Dinas	2	0	100%	2	0	100%
Program						
Dinas	5	0	100%	5	0	100%
Kegiatan						
Dinas	14	0	100%	17	0	100%
Sudin Jakarta Pusat	10	0	100%	11	0	100%
Sudin Jakarta Utara	10	0	100%	10	0	100%
Sudin Jakarta Barat	10	0	100%	11	0	100%
Sudin Jakarta Selatan	10	0	100%	11	0	100%

Level Kinerja	Polarisasi					
	2024			2025		
	Benar	Salah	Presentase Benar	Benar	Salah	Presentase Benar
(1)	(5)	(6)	(7)	(5)	(6)	(7)
Sudin Jakarta Timur	10	0	100%	10	0	100%
Sudin Kepulauan Seribu	7	0	100%	10	0	100%
UPTIK	6	0	100%	7	0	100%
UPAK	7	0	100%	8	0	100%
Subkegiatan						
Dinas	31	0	100%	35	0	100%
Sudin Jakarta Pusat	17	0	100%	20	0	100%
Sudin Jakarta Utara	20	0	100%	22	0	100%
Sudin Jakarta Barat	21	0	100%	23	0	100%
Sudin Jakarta Selatan	23	0	100%	24	0	100%
Sudin Jakarta Timur	24	0	100%	24	0	100%
Sudin Kepulauan Seribu	11	0	100%	15	0	100%
UPTIK	10	0	100%	11	0	100%
UPAK	12	0	100%	14	0	100%
Total	260	0	100%	290	0	100%

Sumber : Sistem Informasi Monev Kinerja Tahun 2024 dan 2025, diolah

E.3.2 Analisis Sebaran Trajektori Target Indikator Tahun Berjalan

Berikut evaluasi terhadap sebaran trajektori Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta di seluruh level kinerja yang disusun dan diinput ke dalam sistem informasi monev dengan membandingkan sebaran tahun 2024 dan sebaran tahun 2025 yang terdapat pada grafik :



Gambar 2. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan 2025

Penjelasan :

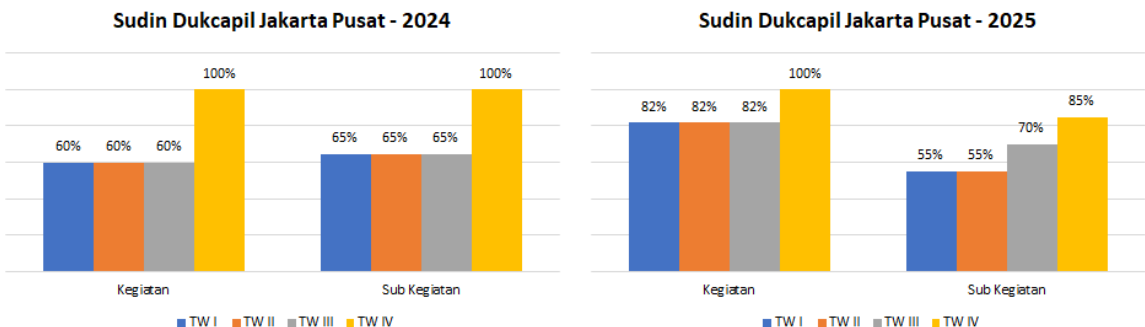
Trajektori pada level tujuan dan sasaran sudah terdistribusi dengan baik, sedangkan trajektori pada level kegiatan dan subkegiatan tidak terdistribusi di setiap triwulan dikarenakan terdapat kegiatan atau subkegiatan yang hanya dilaksanakan pada salah satu triwulan saja ataupun pada triwulan-triwulan tertentu sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya. Berikut kegiatan dan sub kegiatan yang trajektori targetnya tidak terdistribusi di setiap triwulan :

Level Kegiatan :

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
- Penyediaan Profil Kependudukan
- Penataan Pendaftaran Penduduk
- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Level Sub Kegiatan :

- Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional
- Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
- Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan
- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
- Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan
- Fasilitasi Pendaftaran Penduduk
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Gambar 3. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024 dan 2025

Penjelasan :

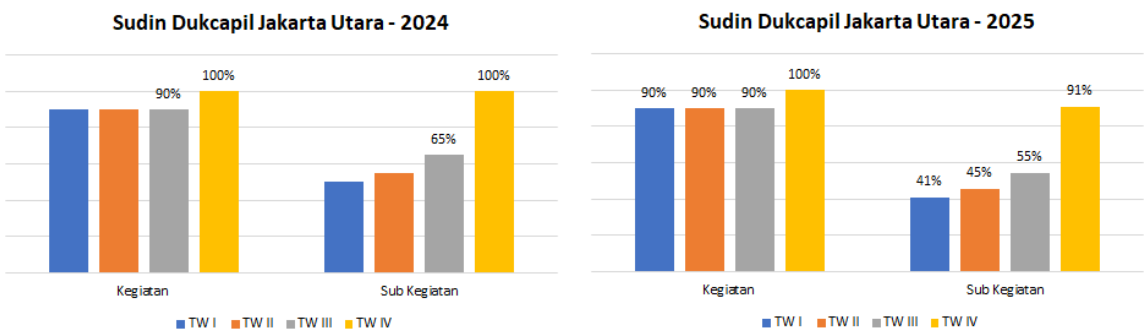
Trajektori tidak terdistribusi di setiap triwulan dikarenakan terdapat kegiatan atau subkegiatan yang hanya dilaksanakan pada salah satu triwulan saja ataupun pada triwulan-triwulan tertentu sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya. Berikut kegiatan dan sub kegiatan yang trajektori targetnya tidak terdistribusi di setiap triwulan :

Level Kegiatan :

- Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
- Penyediaan Profil Kependudukan

Level Sub Kegiatan :

- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Gambar 4. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara Tahun 2024 dan 2025

Penjelasan :

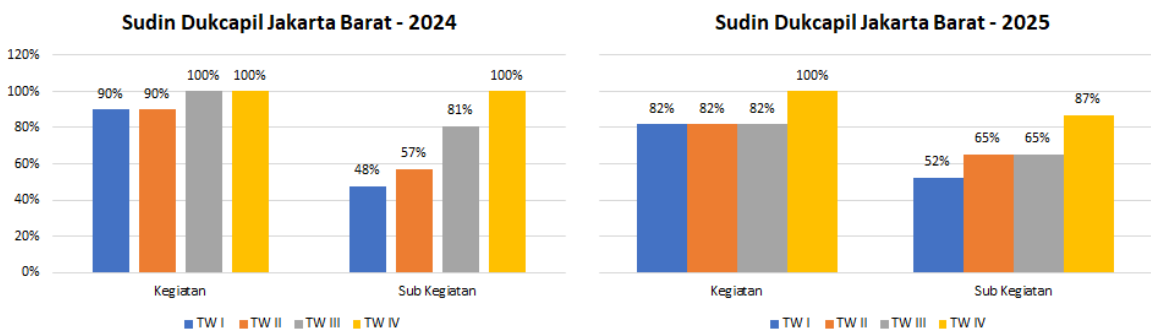
Trajektori tidak terdistribusi di setiap triwulan dikarenakan terdapat kegiatan atau subkegiatan yang hanya dilaksanakan pada salah satu triwulan saja ataupun pada triwulan-triwulan tertentu sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya. Berikut kegiatan dan sub kegiatan yang trajektori targetnya tidak terdistribusi di setiap triwulan :

Level Kegiatan :

- Penyediaan Profil Kependudukan

Level Sub Kegiatan :

- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
- Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk : pada Sudin Dukcapil Jakarta Utara, pelaksanaan kegiatan dilakukan mulai bulan April.
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Fasilitas Kunjungan Tamu
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Gambar 5. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2024 dan 2025

Penjelasan :

Trajektori tidak terdistribusi di setiap triwulan dikarenakan terdapat kegiatan atau subkegiatan yang hanya dilaksanakan pada salah satu triwulan saja ataupun pada triwulan-triwulan tertentu sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya. Berikut kegiatan dan sub kegiatan yang trajektori targetnya tidak terdistribusi di setiap triwulan :

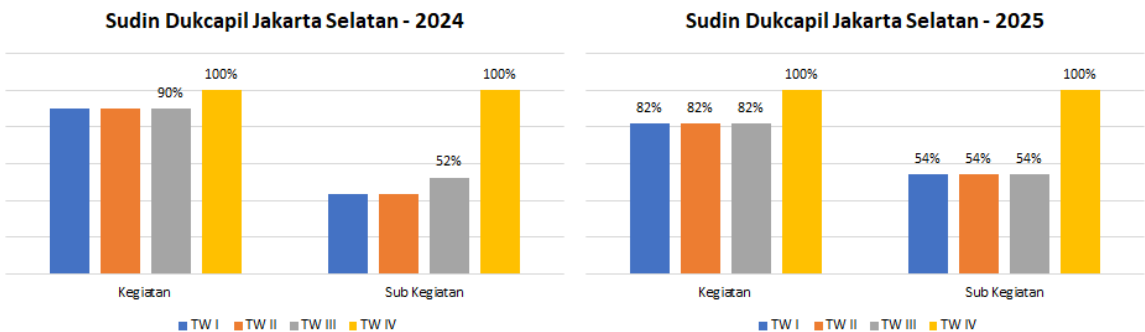
Kegiatan :

- Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
- Penyediaan Profil Kependudukan

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Gambar 6. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan Tahun 2024 dan 2025

Penjelasan :

Trajektori tidak terdistribusi di setiap triwulan dikarenakan terdapat kegiatan atau subkegiatan yang hanya dilaksanakan pada salah satu triwulan saja ataupun pada triwulan-triwulan tertentu sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya. Berikut kegiatan dan sub kegiatan yang trajektori targetnya tidak terdistribusi di setiap triwulan :

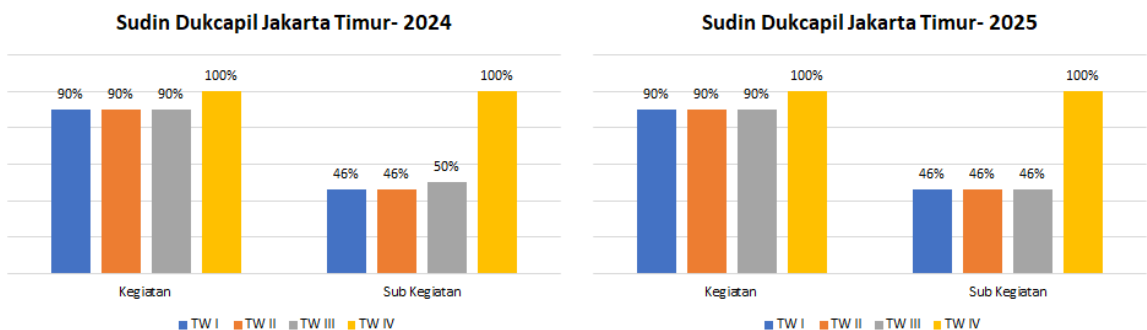
Kegiatan :

- Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan
- Penyediaan Profil Kependudukan

Sub Kegiatan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Gambar 7. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2024 dan 2025

Penjelasan :

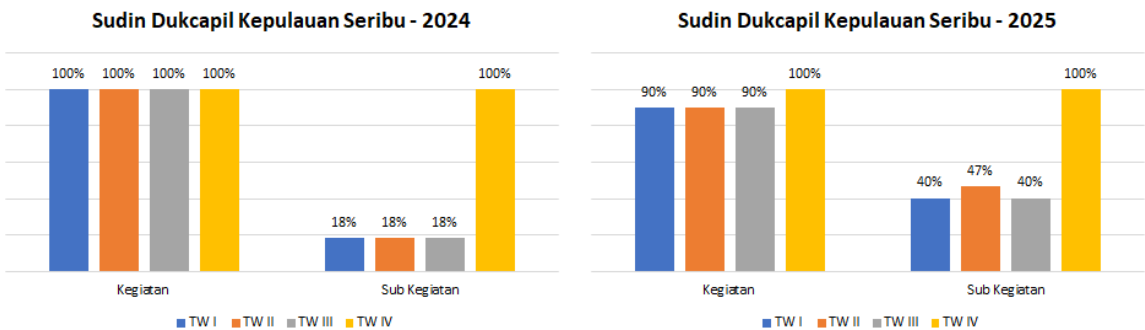
Trajektori tidak terdistribusi di setiap triwulan dikarenakan terdapat kegiatan atau subkegiatan yang hanya dilaksanakan pada salah satu triwulan saja ataupun pada triwulan-triwulan tertentu sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya. Berikut kegiatan dan sub kegiatan yang trajektori targetnya tidak terdistribusi di setiap triwulan :

Kegiatan :

- Penyediaan Profil Kependudukan

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



Gambar 8. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2024 dan 2025

Penjelasan :

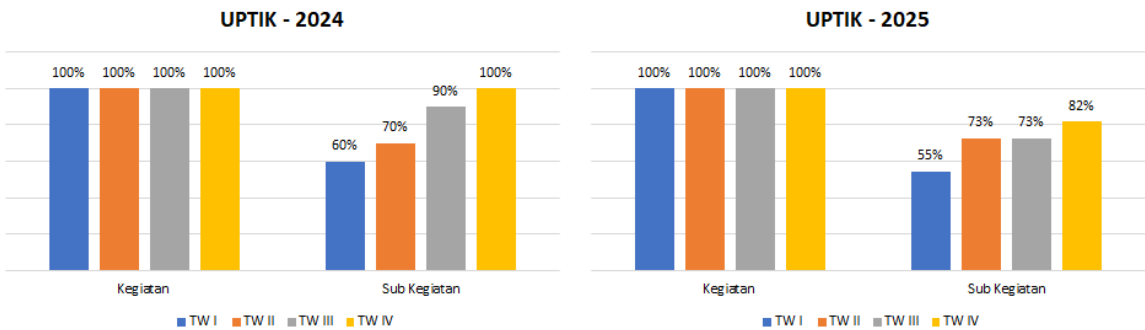
Trajektori tidak terdistribusi di setiap triwulan dikarenakan terdapat kegiatan atau subkegiatan yang hanya dilaksanakan pada salah satu triwulan saja ataupun pada triwulan-triwulan tertentu sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya. Berikut kegiatan dan sub kegiatan yang trajektori targetnya tidak terdistribusi di setiap triwulan :

Kegiatan :

- Penyediaan Profil Kependudukan

Sub Kegiatan :

- Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Mebel
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



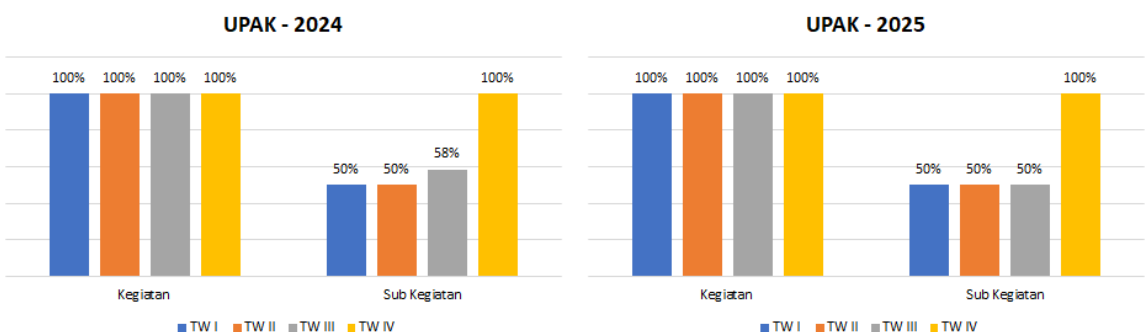
Gambar 9. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Unit Pengelola Teknologi Informasi Kependudukan (UPTIK) Tahun 2024 dan 2025

Penjelasan :

Pada level kegiatan, trajektori sudah terdistribusi dengan baik. Namun pada level sub kegiatan trajektori target tidak terdistribusi di setiap triwulan dikarenakan ada subkegiatan yang hanya dilaksanakan pada salah satu triwulan saja ataupun pada triwulan-

triwulan tertentu sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya. Berikut sub kegiatan yang trajektori targetnya tidak terdistribusi di setiap triwulan :

- Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya



Gambar 10. Perbandingan Distribusi Target Kinerja pada Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan (UPAK) Tahun 2024 dan 2025

Penjelasan :

Pada level kegiatan, trajektori sudah terdistribusi dengan baik. Namun pada level sub kegiatan trajektori target tidak terdistribusi di setiap triwulan dikarenakan ada subkegiatan yang hanya dilaksanakan pada salah satu triwulan saja ataupun pada triwulan-triwulan tertentu sesuai dengan pelaksanaan kegiatannya. Berikut sub kegiatan yang trajektori targetnya tidak terdistribusi di setiap triwulan :

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

E.4 Analisis Korelasi Capaian Kinerja Indikator dan Serapan Anggaran
E.4.1 Korelasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Serapan Anggaran

Tabel 10. Korelasi Capaian Kinerja Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Serapan Anggaran Semester I Tahun 2025

Kode	Uraian	Target Tahunan	Kinerja Indikator Program TW2 Tahun 2025			Rata-rata Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahunan	Anggaran TW II Tahun 2025			Kategori Korelasi Capaian	Sebab Ketidakselarasan
			Target TW 2	Realisasi TW 2	CAPAIAN TW 2					Target Keuangan TW II	Realisasi Keuangan TW II	Serapan Anggaran TW II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.12.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi													
	Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4	4	4	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	300.322.015.903	83.256.547.077	113.313.543.063	136,10%	1 (satu)	Korelasi capaian kinerja pada program ini menunjukkan kondisi yang baik
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk													
	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	99	99	99,41	100,41%	100,00%	100,00%	100,00%	84.965.883.862	27.436.882.781	30.020.448.181	109,42%	1 (satu)	Korelasi capaian kinerja pada program ini menunjukkan kondisi yang baik
2.12.03	Program Pencatatan Sipil													
	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	99,8	99,8	99,94	100,14%	100,00%	100,00%	100,00%	6.680.701.913	1.883.354.010	1.699.644.811	90,25%	2 (dua)	Realisasi anggaran tidak sesuai dengan jumlah yang direncanakan.
2.12.04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan													
	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	96,43	94	118,46	126,02%	100,00%	100,00%	100,00%	1.337.698.621	492.092.209	449.023.015	91,25%	2 (dua)	Realisasi anggaran tidak sesuai dengan jumlah yang direncanakan.
2.12.05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan													

Kode	Uraian	Target Tahunan	Kinerja Indikator Program TW2 Tahun 2025			Rata-rata Capaian Program	Rata-rata Capaian Kegiatan	Rata-rata Capaian Sub Kegiatan	Anggaran Tahunan	Anggaran TW II Tahun 2025			Kategori Korelasi Capaian	Sebab Ketidakselarasan
			Target TW 2	Realisasi TW 2	CAPAIAN TW 2					Target Keuangan TW II	Realisasi Keuangan TW II	Serapan Anggaran TW II		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Persentase Tersusunnya Profil Kependudukan	100	50	50	100,00%	100,00%	N/A	100,00%	384.993.519	59.061.694	53.857.500	91,19%	6 (enam)	Realisasi anggaran tidak sesuai dengan jumlah yang direncanakan.

Sumber: Sistem Informasi Monev Kinerja Tahun 2025, diolah

Program dapat mencapai target kinerja karena pengelolaan yang efisien, sehingga tidak membutuhkan seluruh anggaran yang telah dialokasikan, Keterlambatan pelaksanaan program atau proses administrasi dapat menyebabkan sebagian anggaran belum terealisasi meskipun kinerja sudah tercapai seperti pengadaan barang/jasa atau proses tender yang tertunda.

Berdasarkan tabel korelasi capaian kinerja program dan serapan anggaran semester I tahun 2025 pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, dapat diamati bahwa terdapat kecenderungan ketidaksesuaian antara tingkat serapan anggaran dengan capaian kinerja pada sebagian program.

Sebagian besar program menunjukkan korelasi yang lemah antara realisasi anggaran dan capaian kinerja, yang berarti bahwa peningkatan serapan anggaran tidak selalu diikuti oleh peningkatan capaian kinerja secara proporsional. Hal ini mengindikasikan bahwa efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan implementasi strategi non-moneter seperti digitalisasi layanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta inovasi proses kerja, berperan lebih dominan dalam mendorong keberhasilan kinerja.

Oleh karena itu, fokus pengelolaan program ke depan perlu diarahkan pada optimalisasi mekanisme kerja dan peningkatan kualitas layanan melalui pemanfaatan teknologi dan penguatan kapasitas SDM, bukan semata-mata pada peningkatan anggaran. Pendekatan ini diharapkan dapat mendukung capaian kinerja yang lebih maksimal dengan pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan efektif.

F. Kesimpulan dan Tindak Lanjut Rencana Perbaikan Kualitas Kinerja

F.1 Kesimpulan

Hasil evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan III Tahun 2024 menunjukkan bahwa secara keseluruhan, capaian program telah berhasil melampaui target dengan kategori "Sangat Tinggi." Namun, terdapat ketidakseimbangan dalam efisiensi anggaran, di mana beberapa program memiliki serapan yang berlebihan sementara yang lain berada di bawah target. Hambatan seperti kurang optimalnya infrastruktur teknologi, kesenjangan SDM di wilayah tertentu, serta kurangnya pengelolaan anggaran yang tepat menjadi tantangan yang memerlukan perhatian.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta sebagai instansi teknis yang melayani masyarakat dibidang administrasi kependudukan, telah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Pencapaian target yang telah ditetapkan tentunya tidak terlepas dari peran serta semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan bertanggung jawab. Secara umum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dikatakan "Berhasil" dalam pencapaian target capaian kinerja, dengan demikian, 4 sasaran strategis yang ditetapkan yang dicapai melalui 4 (empat) indikator kinerja juga tercapai, namun juga sebagai acuan perbaikan untuk pencapaian kinerja pada waktu yang akan datang.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya secara optimal dengan menggunakan sumber daya yang ada, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun pihak lain yang berkepentingan.

F.2 Tindak Lanjut Rencana Perbaikan Kualitas Kinerja

Pelaksanaan seluruh kegiatan sampai dengan Semester II Tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Tindak lanjut rencana perbaikan kualitas kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta dapat melibatkan beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Optimalisasi Pengelolaan Anggaran

- Melakukan evaluasi mendalam terhadap alokasi anggaran untuk memastikan anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan riil program.
- Menyusun anggaran berbasis kinerja (performance-based budgeting) untuk menghindari pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan dana.

2. **Peningkatan Kapasitas SDM dan Digitalisasi Layanan**

- Meningkatkan pelatihan dan pengembangan kompetensi pegawai agar lebih adaptif terhadap teknologi dan proses baru yang mendukung percepatan layanan.
- Memperluas penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi dalam proses pendaftaran, pencatatan, dan pelayanan administrasi kependudukan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi layanan.

3. **Penguatan Monitoring dan Evaluasi**

- Memperketat sistem monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara berkala untuk mendeteksi dan mengatasi hambatan secara cepat.
- Menerapkan dashboard kinerja yang transparan dan real-time untuk memastikan setiap unit kerja dapat melakukan penyesuaian dengan cepat.

4. **Perbaikan Perencanaan dan Pelaksanaan Program**

- Melakukan review dan perbaikan prosedur perencanaan program agar target dan capaian lebih realistis dan terukur.
- Menjalin koordinasi yang lebih baik antar unit kerja untuk sinkronisasi kegiatan dan optimalisasi sumber daya.

5. **Sosialisasi Masyarakat**

- Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang prosedur layanan Dukcapil untuk meningkatkan partisipasi dan mengurangi hambatan dalam pencapaian target.
- Memfasilitasi umpan balik dari masyarakat sebagai bahan evaluasi dan inovasi layanan.

6. **Reward dan Punishment**

- Membangun sistem insentif yang memotivasi pegawai untuk mencapai target kinerja dengan efisien dan efektif.
- Memberikan penghargaan bagi unit kerja yang berhasil menunjukkan kinerja dan pengelolaan anggaran terbaik.

Dengan langkah-langkah ini, diharapkan kualitas kinerja Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta dapat terus meningkat, sehingga mampu memberikan pelayanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih efektif

LAMPIRAN

Nilai IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan II Tahun 2025

UKPD	UPPD	Unsur_1	Unsur_2	Unsur_3	Unsur_4	Unsur_5	Unsur_6	Unsur_7	Unsur_8	Unsur_9	IKM	Nilai_Mutu
DINAS	Dinas Dukcapil (UPAK)	100	99,6	100	100	100	100	99,8	100	100	99,93	A
SUKU DINAS	JAKARTA BARAT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JAKARTA PUSAT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JAKARTA SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JAKARTA TIMUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JAKARTA UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEPULAUAN SERIBU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
KECAMATAN	CAKUNG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CEMPAKA PUTIH	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CENGKARENG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CILANDAK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CILINCING	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIPAYUNG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIRACAS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	DUREN SAWIT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GAMBIR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GROGOL PETAMBURAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JAGAKARSA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JATINEGARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JOHAR BARU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KALI DERES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEBAYORAN BARU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEBAYORAN LAMA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEBON JERUK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KELAPA GADING	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEMAYORAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEMBANGAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEPULAUAN SERIBU SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEPULAUAN SERIBU UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KOJA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KRAMATJATI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MAKASAR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MAMPANG PRAPATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MATRAMAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MENTENG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PADEMANGAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PAL MERAH	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PANCORAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PASAR MINGGU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PASAR REBO	99,07	99,07	99,07	100	100	100	99,07	100	100	99,59	A

UKPD	UPPD	Unsur_1	Unsur_2	Unsur_3	Unsur_4	Unsur_5	Unsur_6	Unsur_7	Unsur_8	Unsur_9	IKM	Nilai_Mutu
	PENJARINGAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PESANGGRAHAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PULO GADUNG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SENEEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SAWAH BESAR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SETIA BUDI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TAMAN SARI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TAMBORA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TANAH ABANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TANJUNG PRIOK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TEBET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
KELURAHAN	ANCOL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	ANGKE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	BALE KAMBANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	BALI MESTER	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	BAMBU APUS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	BANGKA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	BARU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	BATU AMPAR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	BENDUNGAN HILIR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	BIDARA CINA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	BINTARO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	BUKIT DURI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	BUNGUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CAKUNG BARAT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CAKUNG TIMUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CAWANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CEGER	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CEMPAKA BARU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CEMPAKA PUTIH BARAT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CEMPAKA PUTIH TIMUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CENGKARENG BARAT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CENGKARENG TIMUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIBUBUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIDENG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIGANJUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIJANTUNG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIKINI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIKOKO	98,91	98,91	98,91	98,91	98,91	98,91	98,91	98,91	98,91	98,91	A
	CILANDAK BARAT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CILANDAK TIMUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CILANGKAP	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CILILITAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CILINCING	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIPAYUNG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A

UKPD	UPPD	Unsur_1	Unsur_2	Unsur_3	Unsur_4	Unsur_5	Unsur_6	Unsur_7	Unsur_8	Unsur_9	IKM	Nilai_Mutu
	CIPEDAK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIPETE SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIPETE UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIPINANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIPINANG BESAR SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIPINANG BESAR UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIPINANG CEMPEDAK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIPINANG MELAYU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIPINANG MUARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIPULIR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	CIRACAS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	DUKUH	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	DUREN SAWIT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	DUREN TIGA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	DURI KEPA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	DURI KOSAMBI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	DURI PULO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	DURI SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	DURI UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GALUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GAMBIR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GANDARIA SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GANDARIA UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GEDONG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GELORA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GLODOK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GONDANGDIA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GROGOL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GROGOL SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GROGOL UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GUNTUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GUNUNG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GUNUNG SAHARI SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	GUNUNG SAHARI UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	HALIM PERDANA KUSUMAH	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	HARAPAN MULIA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JAGAKARSA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JATI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JATI PADANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JATI PULO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JATINEGARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JATINEGARA KAUM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A

UKPD	UPPD	Unsur_1	Unsur_2	Unsur_3	Unsur_4	Unsur_5	Unsur_6	Unsur_7	Unsur_8	Unsur_9	IKM	Nilai_Mutu
	JELAMBAR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JELAMBAR BARU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JEMBATAN BESI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JEMBATAN LIMA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JOGLO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	JOHAR BARU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KALI ANYAR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KALIBARU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KALIBATA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KALIDERES	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KALISARI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KAMAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KAMAL MUARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KAMPUNG BALI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KAMPUNG MELAYU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KAMPUNG RAWA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KAMPUNG TENGAH	100	100	100	100	100	100	99,7	100	100	99,97	A
	KAPUK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KAPUK MUARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KARANG ANYAR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KARET	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KARET KUNINGAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KARET SEMANGGI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KARET TENGSIN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KARTINI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KAYU MANIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KAYU PUTIH	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEAGUNGAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEBAGUSAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEBAYORAN LAMA SELATAN	96,59	93,75	98,86	99,43	90,91	90,34	99,43	86,93	86,36	93,62	A
	KEBAYORAN LAMA UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEBON BARU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEBON BAWANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEBON JERUK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEBON KACANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEBON KELAPA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEBON KOSONG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEBON MANGGIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEBON MELATI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEBON PALA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEBON SIRIH	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEDAUNG KALI ANGKE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEDOYA SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEDOYA UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KELAPA DUA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A

UKPD	UPPD	Unsur_1	Unsur_2	Unsur_3	Unsur_4	Unsur_5	Unsur_6	Unsur_7	Unsur_8	Unsur_9	IKM	Nilai_Mutu
	KELAPA DUA WETAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KELAPA GADING BARAT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KELAPA GADING TIMUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEMANGGISAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEMAYORAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEMBANGAN SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KEMBANGAN UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KENARI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KERENDANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KLENDER	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KOJA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KOTA BAMBU SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KOTA BAMBU UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KRAMAT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KRAMAT JATI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KRAMAT PELA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KRUKUT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KUNINGAN BARAT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KUNINGAN TIMUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	KWITANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	LAGOA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	LEBAK BULUS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	LENTENG AGUNG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	LUBANG BUAYA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MAKASAR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MALAKA JAYA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MALAKA SARI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MAMPANG PRAPATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MANGGA BESAR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MANGGA DUA SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MANGGARAI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MANGGARAI SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MAPHAR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MARUNDA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MELAWAI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MENTENG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MENTENG ATAS	100	100	100	100	100	100	100	100	96,62	99,62	A
	MENTENG DALAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MERUYA SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	MERUYA UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A

UKPD	UPPD	Unsur_1	Unsur_2	Unsur_3	Unsur_4	Unsur_5	Unsur_6	Unsur_7	Unsur_8	Unsur_9	IKM	Nilai_Mutu
	MUNJUL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PADEMANGAN BARAT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PADEMANGAN TIMUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PALMERAH	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PALMERIAM	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PANCORAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PAPANGGO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PASAR BARU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PASAR MANGGIS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PASAR MINGGU	100	100	100	99,24	99,24	99,24	99,24	100	99,24	99,58	A
	PASEBAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PEGADUNGAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PEGANGSAAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PEGANGSAAN DUA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PEJAGALAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PEJATEN BARAT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PEJATEN TIMUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PEKAYON	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PEKOJAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PELA MAMPANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PENGADEGAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PENGGILINGAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PENJARINGAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PESANGGRAHAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PETAMBURAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PETOGOGAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PETOJO SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PETOJO UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PETUKANGAN SELATAN	100	100	100	100	100	99,63	99,26	99,26	100	99,8	A
	PETUKANGAN UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PINANG RANTI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PINANGSIA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PISANGAN BARU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PISANGAN TIMUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PLUIT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PONDOK BAMBU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PONDOK KELAPA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PONDOK KOPI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PONDOK LABU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PONDOK PINANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PONDOK RANGGON	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PULAU HARAPAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PULAU KELAPA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PULAU PANGGANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A

UKPD	UPPD	Unsur_1	Unsur_2	Unsur_3	Unsur_4	Unsur_5	Unsur_6	Unsur_7	Unsur_8	Unsur_9	IKM	Nilai_Mutu
	PULAU PARI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PULAU TIDUNG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PULAU UNTUNG JAWA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PULO	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PULO GADUNG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	PULO GEBANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	RAGUNAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	RAMBUTAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	RAWA BADAK SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	RAWA BADAK UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	RAWA BARAT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	RAWA BUAYA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	RAWA BUNGA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	RAWA JATI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	RAWA TERATE	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	RAWAMANGUN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	RAWASARI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	ROA MALAKA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	ROROTAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SELONG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SEMANAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SEMPER BARAT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SEMPER TIMUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SENAYAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SEZEN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SERDANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SETIA BUDI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SETU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SLIPI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SRENGSENG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SRENGSENG SAWAH	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SUKABUMI SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SUKABUMI UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SUKAPURA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SUMUR BATU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SUNGAI BAMBU	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SUNTER AGUNG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SUNTER JAYA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	SUSUKAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TAMAN SARI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TAMBORA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TANAH SEREAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TANAH TINGGI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TANGKI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A

UKPD	UPPD	Unsur_1	Unsur_2	Unsur_3	Unsur_4	Unsur_5	Unsur_6	Unsur_7	Unsur_8	Unsur_9	IKM	Nilai_Mutu
	TANJUNG BARAT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TANJUNG DUREN SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TANJUNG DUREN UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TANJUNG PRIOK	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TEBET BARAT	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TEBET TIMUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TEGAL ALUR	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TEGAL PARANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TOMANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TUGU SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	TUGU UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	UJUNG MENTENG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	ULUJAMI	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	UTAN KAYU SELATAN	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	UTAN KAYU UTARA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	UTAN PANJANG	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	WARAKAS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
	WIJAYA KUSUMA	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	A
TOTAL	IKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta (Eksternal)	99,98	99,97	99,99	99,99	99,96	99,96	99,99	99,94	99,93	99,97	A

CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK TRIWULAN II TAHUN 2025
PER KECAMATAN
BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI KEMENDAGRI 31 DESEMBER 2024

NO	NAMA_KAB	NAMA_KEC	CAKUPAN KEPEMILIKAN KIA			CAKUPAN PEREKAMAN KTP EL			CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN DAFDUK TW II TAHUN 2025
			JML PENDUDUK USIA 0-16TH	JML KEPEMILIKAN KIA SETELAH DIKURANGI YANG TIDAK AKTIF DAN PINDAH DAN TL COKLIT	%	JML PENDUDUK USIA WK	JML PEREKAMAN KTP EL SETELAH DIKURANGI YANG TIDAK AKTIF, PINDAH DAN TL COKLIT	%	
1	ADM. KEPULAUAN SERIBU	KEPULAUAN SERIBU UTARA	5.428	5.428	100,00%	12.150	12.150	100,00%	100,00%
2	ADM. KEPULAUAN SERIBU	KEPULAUAN SERIBU SELATAN	4.014	4.014	100,00%	8.742	8.742	100,00%	100,00%
3	JAKARTA PUSAT	GAMBIR	20.913	20.897	99,92%	69.725	69.725	100,00%	99,96%
4	JAKARTA PUSAT	SAWAH BESAR	27.319	27.319	100,00%	93.278	93.278	100,00%	100,00%
5	JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	62.940	62.940	100,00%	183.858	183.854	100,00%	100,00%
6	JAKARTA PUSAT	S E N E N	29.836	29.836	100,00%	89.552	89.552	100,00%	100,00%
7	JAKARTA PUSAT	CEMPAKA PUTIH	23.006	23.006	100,00%	72.398	72.397	100,00%	100,00%
8	JAKARTA PUSAT	MENTENG	20.505	20.505	100,00%	64.511	64.511	100,00%	100,00%
9	JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	43.132	42.824	99,29%	122.047	121.970	99,94%	99,61%
10	JAKARTA PUSAT	JOHAR BARU	34.931	34.931	100,00%	99.319	99.266	99,95%	99,97%
11	JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	83.924	83.924	100,00%	242.161	242.161	100,00%	100,00%
12	JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	107.884	106.310	98,54%	298.557	298.152	99,86%	99,20%
13	JAKARTA UTARA	KOJA	100.502	100.004	99,50%	241.777	241.682	99,96%	99,73%
14	JAKARTA UTARA	CILINCING	134.041	133.911	99,90%	311.688	311.274	99,87%	99,89%
15	JAKARTA UTARA	PADEMANGAN	43.317	40.141	92,67%	123.270	123.146	99,90%	96,28%
16	JAKARTA UTARA	KELAPA GADING	32.501	32.182	99,02%	112.410	112.212	99,82%	99,42%
17	JAKARTA BARAT	CENGKARENG	161.807	160.191	99,00%	419.981	419.490	99,88%	99,44%
18	JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	53.989	53.989	100,00%	176.184	176.072	99,94%	99,97%

NO	NAMA_KAB	NAMA_KEC	CAKUPAN KEPEMILIKAN KIA			CAKUPAN PEREKAMAN KTP EL			CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN DAFDUK TW II TAHUN 2025
			JML PENDUDUK USIA 0-16TH	JML KEPEMILIKAN KIA SETELAH DIKURANGI YANG TIDAK AKTIF DAN PINDAH DAN TL COKLIT	%	JML PENDUDUK USIA WK	JML PEREKAMAN KTP EL SETELAH DIKURANGI YANG TIDAK AKTIF, PINDAH DAN TL COKLIT	%	
19	JAKARTA BARAT	TAMAN SARI	27.699	27.649	99,82%	95.210	95.162	99,95%	99,88%
20	JAKARTA BARAT	TAMBORA	64.071	62.993	98,32%	193.990	193.730	99,87%	99,09%
21	JAKARTA BARAT	KEBON JERUK	95.418	95.027	99,59%	267.223	267.077	99,95%	99,77%
22	JAKARTA BARAT	KALI DERES	128.923	127.999	99,28%	335.153	334.493	99,80%	99,54%
23	JAKARTA BARAT	PAL MERAH	59.109	58.716	99,34%	166.733	166.627	99,94%	99,64%
24	JAKARTA BARAT	KEMBANGAN	83.649	83.410	99,71%	227.613	227.582	99,99%	99,85%
25	JAKARTA SELATAN	TEBET	57.370	56.897	99,18%	173.948	173.865	99,95%	99,56%
26	JAKARTA SELATAN	SETIA BUDI	27.502	26.921	97,89%	85.645	85.549	99,89%	98,89%
27	JAKARTA SELATAN	MAMPANG PRAPATAN	39.493	38.619	97,79%	112.944	112.841	99,91%	98,85%
28	JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	84.787	83.811	98,85%	239.904	239.605	99,88%	99,36%
29	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	82.650	82.359	99,65%	239.385	239.225	99,93%	99,79%
30	JAKARTA SELATAN	CILANDAK	54.700	54.040	98,79%	166.268	166.072	99,88%	99,34%
31	JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	35.430	34.928	98,58%	112.811	112.711	99,91%	99,25%
32	JAKARTA SELATAN	PANCORAN	45.173	44.635	98,81%	129.369	129.270	99,92%	99,37%
33	JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	103.428	102.194	98,81%	275.957	275.712	99,91%	99,36%
34	JAKARTA SELATAN	PESANGGRAHAN	71.146	70.146	98,59%	193.501	193.307	99,90%	99,25%
35	JAKARTA TIMUR	MATRAMAN	45.192	44.584	98,65%	137.789	137.605	99,87%	99,26%
36	JAKARTA TIMUR	PULO GADUNG	74.482	73.903	99,22%	223.440	223.175	99,88%	99,55%
37	JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	83.167	81.967	98,56%	235.652	235.247	99,83%	99,19%
38	JAKARTA TIMUR	KRAMATJATI	86.717	86.053	99,23%	230.710	230.362	99,85%	99,54%
39	JAKARTA TIMUR	PASAR REBO	64.686	64.648	99,94%	171.701	171.649	99,97%	99,96%
40	JAKARTA TIMUR	CAKUNG	166.827	160.897	96,45%	415.500	414.668	99,80%	98,12%
41	JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	118.309	116.209	98,22%	327.134	326.741	99,88%	99,05%

NO	NAMA_KAB	NAMA_KEC	CAKUPAN KEPEMILIKAN KIA			CAKUPAN PEREKAMAN KTP EL			CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN DAFDUK TW II TAHUN 2025
			JML PENDUDUK USIA 0-16TH	JML KEPEMILIKAN KIA SETELAH DIKURANGI YANG TIDAK AKTIF DAN PINDAH DAN TL COKLIT	%	JML PENDUDUK USIA WK	JML PEREKAMAN KTP EL SETELAH DIKURANGI YANG TIDAK AKTIF, PINDAH DAN TL COKLIT	%	
42	JAKARTA TIMUR	MAKASAR	59.502	58.605	98,49%	161.865	161.752	99,93%	99,21%
43	JAKARTA TIMUR	CIRACAS	87.836	86.734	98,75%	232.943	232.797	99,94%	99,34%
44	JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	85.123	84.462	99,22%	221.842	221.764	99,96%	99,59%

CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN PENCATATAN SIPIL TRIWULAN II TAHUN 2025
PER KECAMATAN
BERDASARKAN DATA KONSOLIDASI KEMENDAGRI 31 DESEMBER 2024

NAMA_KAB	NAMA_KEC	CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN CAPIL TW II TAHUN 2025
		JUMLAH PENDUDUK USIA 0 - 17 TAHUN	JML KEPEMILIKAN AKTA LAHIR SETELAH DIKURANGI YANG TIDAK AKTIF, PINDAH DAN TL COKLIT	%	KPI AKTA KEMATIAN TRIWULAN II TAHUN 2025		%	KPI AKTA PERKAWINAN TRIWULAN II TAHUN 2025		%	KPI AKTA PERCERAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025		%	
					LAPOR MATI	TOTAL AKTA KEMATIAN		JML_AKTA_KAWIN	JML_PEMOHON		JML AKTA CERAJ	PEMOHON		
ADM.KEP.SERIBU	KEPULAUAN SERIBU UTARA	5.714	5.714	100,00%	37	37	100,00%	-	-	100,00%	1	1	100,00%	100,00%
ADM.KEP.SERIBU	KEPULAUAN SERIBU SELATAN	4.207	4.207	100,00%	24	24	100,00%	-	-	100,00%	-	-	100,00%	100,00%
JAKARTA PUSAT	GAMBIR	22.145	22.144	100,00%	192	192	100,00%	12	12	100,00%	-	-	100,00%	100,00%
JAKARTA PUSAT	SAWAH BESAR	28.898	28.898	100,00%	278	278	100,00%	20	20	100,00%	3	3	100,00%	100,00%
JAKARTA PUSAT	KEMAYORAN	66.638	66.638	100,00%	609	609	100,00%	22	22	100,00%	5	5	100,00%	100,00%
JAKARTA PUSAT	SENEN	31.502	31.502	100,00%	308	308	100,00%	26	26	100,00%	3	3	100,00%	100,00%
JAKARTA PUSAT	CEMPAKA PUTIH	24.287	24.287	100,00%	232	232	100,00%	14	14	100,00%	3	3	100,00%	100,00%
JAKARTA PUSAT	MENTENG	21.620	21.620	100,00%	205	205	100,00%	23	23	100,00%	3	3	100,00%	100,00%
JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	45.466	45.411	99,88%	363	363	100,00%	12	12	100,00%	1	1	100,00%	99,97%
JAKARTA PUSAT	JOHAR BARU	36.932	36.932	100,00%	363	363	100,00%	10	10	100,00%	-	-	100,00%	100,00%
JAKARTA UTARA	PENJARINGAN	87.986	87.986	100,00%	535	535	100,00%	49	49	100,00%	6	6	100,00%	100,00%
JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	113.511	113.349	99,86%	765	765	100,00%	77	77	100,00%	14	14	100,00%	99,96%
JAKARTA UTARA	KOJA	105.383	105.383	100,00%	666	666	100,00%	128	128	100,00%	18	18	100,00%	100,00%
JAKARTA UTARA	CILINCING	140.409	140.409	100,00%	778	778	100,00%	103	103	100,00%	11	11	100,00%	100,00%
JAKARTA UTARA	PADEMANGAN	45.516	44.687	98,18%	316	316	100,00%	51	51	100,00%	3	3	100,00%	99,54%
JAKARTA UTARA	KELAPA GADING	34.322	34.302	99,94%	231	231	100,00%	67	67	100,00%	6	6	100,00%	99,99%

NAMA_KAB	NAMA_KEC	CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN CAPIL TW II TAHUN 2025
		JUMLAH PENDUDUK USIA 0 - 17 TAHUN	JML KEPEMILIKAN AKTA LAHIR SETELAH DIKURANGI YANG TIDAK AKTIF, PINDAH DAN TL COKLIT	%	KPI AKTA KEMATIAN TRIWULAN II TAHUN 2025		%	KPI AKTA PERKAWINAN TRIWULAN II TAHUN 2025		%	KPI AKTA PERCERAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025		%	
					LAPOR MATI	TOTAL AKTA KEMATIAN		JML_AKTA_KAWIN	JML_PEMOHON		JML AKTA CERAI	PEMOHON		
JAKARTA BARAT	CENGKARENG	170.097	169.840	99,85%	901	901	100,00%	33	33	100,00%	8	8	100,00%	99,96%
JAKARTA BARAT	GROGOL PETAMBURAN	57.098	57.062	99,94%	426	426	100,00%	97	97	100,00%	9	9	100,00%	99,98%
JAKARTA BARAT	TAMAN SARI	29.274	29.274	100,00%	255	255	100,00%	66	66	100,00%	5	5	100,00%	100,00%
JAKARTA BARAT	TAMBORA	67.719	67.399	99,53%	490	490	100,00%	76	76	100,00%	12	12	100,00%	99,88%
JAKARTA BARAT	KEBON JERUK	100.681	100.571	99,89%	566	566	100,00%	22	22	100,00%	5	5	100,00%	99,97%
JAKARTA BARAT	KALIDERES	135.694	135.575	99,91%	634	634	100,00%	48	48	100,00%	5	5	100,00%	99,98%
JAKARTA BARAT	PAL MERAH	62.535	62.522	99,98%	473	473	100,00%	130	130	100,00%	19	19	100,00%	99,99%
JAKARTA BARAT	KEMBANGAN	88.227	88.206	99,98%	470	470	100,00%	77	77	100,00%	15	15	100,00%	99,99%
JAKARTA SELATAN	TEBET	60.875	60.736	99,77%	560	560	100,00%	32	32	100,00%	1	1	100,00%	99,94%
JAKARTA SELATAN	SETIABUDI	29.212	29.075	99,53%	268	268	100,00%	12	12	100,00%	2	2	100,00%	99,88%
JAKARTA SELATAN	MAMPANG PRAPATAN	41.797	41.546	99,40%	329	329	100,00%	14	14	100,00%	-	-	100,00%	99,85%
JAKARTA SELATAN	PASAR MINGGU	89.683	89.263	99,53%	650	650	100,00%	29	29	100,00%	3	3	100,00%	99,88%
JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN LAMA	87.505	87.415	99,90%	669	669	100,00%	18	18	100,00%	7	7	100,00%	99,97%
JAKARTA SELATAN	CILANDAK	57.983	57.827	99,73%	410	410	100,00%	34	34	100,00%	-	-	100,00%	99,93%
JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	37.543	37.516	99,93%	358	358	100,00%	5	5	100,00%	-	-	100,00%	99,98%
JAKARTA SELATAN	PANCORAN	47.822	47.697	99,74%	375	375	100,00%	13	13	100,00%	-	-	100,00%	99,93%
JAKARTA SELATAN	JAGAKARSA	109.609	109.226	99,65%	691	691	100,00%	15	15	100,00%	2	2	100,00%	99,91%
JAKARTA SELATAN	PESANGGRAHAN	75.295	74.941	99,53%	464	464	100,00%	12	12	100,00%	3	3	100,00%	99,88%

NAMA_KAB	NAMA_KEC	CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KELAHIRAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA PERKAWINAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN			CAKUPAN KEPEMILIKAN DOKUMEN CAPIL TW II TAHUN 2025
		JUMLAH PENDUDUK USIA 0 - 17 TAHUN	JML KEPEMILIKAN AKTA LAHIR SETELAH DIKURANGI YANG TIDAK AKTIF, PINDAH DAN TL COKLIT	%	KPI AKTA KEMATIAN TRIWULAN II TAHUN 2025		%	KPI AKTA PERKAWINAN TRIWULAN II TAHUN 2025		%	KPI AKTA PERCERAIAN TRIWULAN II TAHUN 2025		%	
					LAPOR MATI	TOTAL AKTA KEMATIAN		JML_AKTA_KAWIN	JML_PEMOHON		JML AKTA CERAI	PEMOHON		
JAKARTA TIMUR	MATRAMAN	47.799	47.714	99,82%	463	463	100,00%	24	24	100,00%	4	4	100,00%	99,96%
JAKARTA TIMUR	PULOGADUNG	78.864	78.779	99,89%	689	689	100,00%	51	51	100,00%	5	5	100,00%	99,97%
JAKARTA TIMUR	JATINEGARA	87.757	87.536	99,75%	756	756	100,00%	32	32	100,00%	7	7	100,00%	99,94%
JAKARTA TIMUR	KRAMATJATI	91.485	91.308	99,81%	640	640	100,00%	37	37	100,00%	3	3	100,00%	99,95%
JAKARTA TIMUR	PASAR REBO	68.487	68.481	99,99%	467	467	100,00%	32	32	100,00%	1	1	100,00%	100,00%
JAKARTA TIMUR	CAKUNG	175.042	173.198	98,95%	1.048	1.048	100,00%	59	59	100,00%	10	10	100,00%	99,74%
JAKARTA TIMUR	DUREN SAWIT	125.027	124.539	99,61%	956	956	100,00%	55	55	100,00%	8	8	100,00%	99,90%
JAKARTA TIMUR	MAKASAR	62.919	62.822	99,85%	473	473	100,00%	38	38	100,00%	1	1	100,00%	99,96%
JAKARTA TIMUR	CIRACAS	92.920	92.768	99,84%	611	611	100,00%	49	49	100,00%	2	2	100,00%	99,96%
JAKARTA TIMUR	CIPAYUNG	89.826	89.657	99,81%	575	575	100,00%	44	44	100,00%	3	3	100,00%	99,95%
PROVINSI DKI JAKARTA		3.083.311	3.075.962	99,76%	21.569	21.569	100,00%	1.768	1.768	100,00%	217	217	100,00%	99,94%

MATRIKS CASCADING KINERJA
TAHUN 2025

PD / UKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					KUALITAS IKU		Bobot IKU	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	CASCADING	TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PDI UKPD							
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)			KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Moderate / High)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TW I	TW II			TW III	TW IV	TAHUNAN				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)				
Tertelaksananya Transformasi Pelayanan Publik dan Manajemen Pemerintahan Berintegritas								Indeks Reformasi Birokrasi	Dasar Hukum : Berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Definisi Operasional : IRB adalah nilai akhir dari serangkaian kegiatan evaluasi atau penilaian 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi Formula Pengukuran : yaitu a. Manajemen Perubahan, b. Penguatan pengawasan, c. Penguatan akuntabilitas, d. Penataan Organisasi, e. Penataan tatakelola, f. Penataan manajemen SDM, g. Deregulasi Kebijakan, h. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian IRB dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB Sumber : Kementerian PAN dan RB	Impact	Indeks	Maximize	Take Last Known		Exact	Moderate							N/A	N/A	N/A	84,00	84,00			
	Meningkatnya Kualitas, Aksesibilitas, dan Kemudahan Layanan Masyarakat							Indeks Kepuasan Masyarakat	Dasar Hukum : Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Definisi Operasional : Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat V-336 terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Formula Pengukuran : Biro ORB melaksanakan kegiatan perumusan dan penyusunan bahan kebijakan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, bimbingan dan konsultasi dan penyajian dokumen IKM Provinsi DKI Jakarta untuk dilaporkan ke Kementerian PAN dan RB. IKM = Total Nilai SKPD yang melaksanakan SKM/Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM. Sumber : Kementerian PAN dan RB	Impact	Indeks	Maximize	Take Last Known		Exact	Moderate		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	88,70	88,70						
		Memberikan Pemenuhan Atas Hak Layanan Administrasi Kependudukan						Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Administrasi	Dasar Hukum : Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Definisi Operasional : Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat V-336 terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Formula Pengukuran : Metode pengukuran mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017, dimana masyarakat melakukan penilaian kepuasan terhadap layanan dalam rentang angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat), dengan rentang penilaian persepsi sebagai berikut: a. Nilai Persepsi 1, dengan nilai interval IKM sebesar 1,00 – 2,59, atau nilai interval konversi 25,00 – 64,99; b. Nilai Persepsi 2, dengan nilai interval IKM sebesar 2,60 – 3,06, atau nilai interval konversi 65,00 – 76,60; c. Nilai Persepsi 3, dengan nilai interval IKM sebesar 3,07 – 3,53, atau nilai interval konversi 76,61 – 88,30; d. Nilai Persepsi 4, dengan nilai interval IKM sebesar 3,54 – 4,00, atau nilai interval konversi 88,31 – 100,00. Catatan : Target tidak melebihi kondisi awal, tetapi sudah melebihi dari target capaian IKM di atasnya (IKM sebagai indikator sasaran RPD). Sumber : Kementerian PAN dan RB	Outcome Impact	Indeks	Maximize	Take Last Known		Exact	Moderate		Cascading	Indirect	99,00	99,30	99,50	99,80	99,80		Kepala Dinas	Dinas Dukcapil			
		Peningkatan Tertib Kependudukan Sesuai Peraturan Perundang-undangan						Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi Operasional : Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil berdasarkan data dinamis dari Ditjen Dukcapil Kemendagri. Formula Pengukuran : 1. Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk : $\frac{KTP-el, KK, KIA}{Jumlah\ kepemilikan\ dokumen\ pendaftaran\ penduduk} \times 100\%$ 2. Persentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil : $\frac{Akte\ Kelahiran, Akte\ Kematian, Akte\ Perkawinan, Akte\ Perceraian}{Jumlah\ kepemilikan\ dokumen\ pencatatan\ sipil} \times 100\%$ Persentase Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan = $\frac{(Persentase\ kepemilikan\ dokumen\ pendaftaran\ penduduk + Persentase\ kepemilikan\ dokumen\ pencatatan\ sipil)}{2}$ Sumber: Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri	Outcome Impact	Persentase	Maximize	Take Last Known	Take Last Known	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	99,46	99,66	99,76	99,96	99,96		Kepala Dinas	Dinas Dukcapil			
				PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi : Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk Formula Pengukuran : Pengukuran cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk : $\frac{KTP-el, KK, KIA}{Jumlah\ kepemilikan\ dokumen} \times 100\%$ Sumber Data : Konsolidasi Ditjen Dukcapil Kemendagri	Outcome	Persentase	Maximize	Take Last Known	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00		Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Kepala UPTIK Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPTIK			

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					KUALITAS IKU				Bobot IKU	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD	
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)				Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)	TW I	TW II	TW III	TW IV			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
					Pelayanan Pendaftaran Kependudukan		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Kependudukan	Persentase jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Persentase dokumen pelayanan pendaftaran penduduk yang diterbitkan Formula Pengukuran: Jumlah dokumen pelayanan pendaftaran penduduk yang diterbitkan / Jumlah dokumen permohonan pendaftaran penduduk x 100%. Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Persentase	Maximize	Average	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk, Kepala UPTIK	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPTIK
					Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional		Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional (Penyusunan Peraturan Daerah tentang Administrasi kependudukan sebagai turunan UU DKI) Formula Pengukuran: Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	1	1	Ketua Subkelompok Mutasi Penduduk dan Pengelolaan Dokumen Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil
					Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi		Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Penduduk non-permanen dan rentan dalam konteks administrasi kependudukan merujuk kepada individu atau kelompok yang memiliki karakteristik khusus yang membuat mereka lebih sulit untuk dicatat atau diadministrasi dalam pencatatan sipil dan manajemen kependudukan Formula Pengukuran: Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan yang tersedia Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	1	1	1	1	4	Ketua Sub Kelompok Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil
					Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi		Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Formula Pengukuran: Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi yang tersedia Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	3	3	3	3	12	Kasubag TU UPTIK	UPTIK
					Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan		Peningkatan Kualitas Layanan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Persentase pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Formula Pengukuran: Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang terlaksana / jumlah pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk yang direncanakan x 100% Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Persentase	Maximize	Average	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	100	100	Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil
					Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk kepada petugas pelayanan (Kasatel Kelurahan, PULP) Formula Pengukuran: Jumlah Laporan Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk yang telah dilaksanakan Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	1	1	Ketua Sub Kelompok Pengendalian Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil
					Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diterbitkan Formula Pengukuran: Jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diterbitkan / Jumlah permohonan pendaftaran penduduk x 100% Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Persentase	Maximize	Average	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Kepala Suku Dinas	Dinas Dukcapil Suku Dinas
					Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk		Terlaksananya Penyelesaian masalah pendaftaran penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Proses yang membantu individu atau keluarga yang menghadapi masalah atau kesulitan terkait dengan administrasi kependudukan Formula Pengukuran: Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Orang	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	25	25	25	25	100	Ketua Sub Kelompok Pengendalian Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					KUALITAS IKU				Bobot IKU	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD / UKPD	
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)				Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)	TW I	TW II	TW III	TW IV			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Tertaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Formula Pengukuran: Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan yang tersedia Sumber Data: ...	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	18	18	18	18	72	Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Suku Dinas
						Penataan Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Penataan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen penataan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Penyediaan Dokumen Kependudukan berupa Blanko KIA Formula Pengukuran: Jumlah Dokumen Kependudukan berupa Blanko KIA yang diterbitkan / Jumlah Pemohonan Dokumen Kependudukan KIA x 100% Sumber Data: ...	Output	Persentase	Maximize	Take Last Known	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	100	100	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil DKI Jakarta
						Pengadaan dokumen kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Penyediaan Dokumen Kependudukan berupa Blanko KIA Formula Pengukuran: Jumlah Dokumen Kependudukan berupa Blanko KIA yang diterbitkan Sumber Data: ...	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	500.000	500.000	Ketua Subkelompok Identitas Penduduk	Dinas Dukcapil DKI Jakarta
						Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terselenggaranya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diterbitkan Formula Pengukuran: Jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang diterbitkan / Jumlah permohonan pendaftaran penduduk x 100% Sumber Data: ...	Output	Persentase	Maximize	Average	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil DKI Jakarta
						Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Tertaksananya Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk Formula Pengukuran: Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif (mobile) Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia Sumber Data: ...	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	7	7	7	7	28	Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Suku Dinas Dukcapil
						Facilitasi Pendaftaran Penduduk	Tertaksananya Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk (Laporan Pemberian Hibah Uang ke Kemendagri) Formula Pengukuran: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas pendaftaran penduduk yang tersedia Sumber Data: ...	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	1	1	Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil
						Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terselenggaranya Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran kependudukan yang tersedia	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Persentase jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran kependudukan yang tersedia Formula Pengukuran: Jumlah dokumen penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang tersedia / Jumlah penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang direncanakan x 100% Sumber Data: ...	Immediate Outcome	Persentase	Maximize	Average	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	100	100	100	100	100	Kepala Suku Dinas	Suku Dinas Dukcapil
						Facilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Tertaksananya Fasilitas Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Laporan Hasil Fasilitas Pendaftaran Penduduk berupa Laporan Bina Kependudukan (Biduk) Formula Pengukuran: Jumlah Laporan Bina Kependudukan (Biduk) yang tersedia Sumber Data: ...	Output	laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	1	1	1	1	4	Kasi Data, Informasi dan Pengawasan	Suku Dinas Dukcapil

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					KUALITAS IKU				Bobot IKU	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD	
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)				Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)	TW I	TW II	TW III	TW IV			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL			Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Rata-rata dari Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil Formula Pengukuran: Pengukuran cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil : Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Perceraian (Jumlah kepemilikan dokumen / jumlah orang yang wajib memiliki dokumen x 100%) Sumber Data:	Outcome	Persentase	Maximize	Take Last Known	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	99,80	99,80	99,80	99,80	99,80	Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kepala UPAK Kepala Suku Dinas	Dinas Dukacapi Suku Dinas UPAK
					Pelayanan Pencatatan Sipil		Tertelaksananya Pelayanan Pencatatan Sipil	Persentase jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan terkait dokumen akte kelahiran/kematian, akte perkawinan/perceraian Formula Pengukuran: Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan / Jumlah dokumen pencatatan sipil yang dimohon x 100% Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Persentase	Maximize	Average	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	100	100	100	100,00	100,00	Kepala Bidang Pencatatan Sipil Kepala UPAK Kepala Suku Dinas Kepala Sudin	Dinas Dukacapi Suku Dinas UPAK
					Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi		Tertelaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Alih media arsip register akte pencatatan sipil Formula Pengukuran: Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi yang tersedia Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	6	6	6	6	24	Ketua Sub Kelompok Pemertastan Dokumen Pencatatan Sipil Kasubag TU UPAK	Dinas Dukacapi UPAK
					Facilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota		Tertelaksananya Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota Formula Pengukuran: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota yang tersedia Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	5	5	5	5	20	Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Sudin Dukacapi
					Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Tertelaksananya Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Dokumen meliputi Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan Formula Pengukuran: Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Layanan	Maximize	Average	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	6	6	6	6	24	Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil	Sudin Dukacapi
					Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi		Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi	Persentase dokumen Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang tersedia	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Presentase Laporan berupa penyelenggaraan pencatatan sipil Formula Pengukuran: Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang tersedia / jumlah dokumen Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang akan disusun x 100% Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Persentase	Maximize	Average	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Pencatatan Sipil Ketua Sub kelompok Perkawinan dan Perceraian	Dinas Dukacapi DKI Jakarta
					Facilitasi terkait pencatatan sipil		Tertelaksananya Fasilitas terkait pencatatan sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Definisi: Laporan hasil fasilitas pencatatan sipil Formula Pengukuran: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pencatatan Sipil yang tersusun Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	1	1	1	1	4	Ketua Sub kelompok Kelahiran dan Kematian	Dinas Dukacapi DKI Jakarta
				PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			Tersusunnya profil kependudukan	Persentase tersusunnya profil kependudukan	Dasar Hukum: 1. Berdasarkan Permendagri No.65 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Definisi: Proses pengumpulan, analisis, dan penyajian data dan informasi terkait dengan populasi atau penduduk DKI Jakarta. Profil kependudukan ini memberikan gambaran komprehensif tentang karakteristik, komposisi, dan dinamika penduduk Formula Pengukuran: Jumlah dokumen profil kependudukan yang tersusun tingkat provinsi dan Kota/ Kabupaten dibagi jumlah target penyusunan profil kependudukan (7 dokumen) dikali 100% Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Outcome	Persentase	Maximize	Take Last Known	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	25	50	75	100,00	100,00	Kepala Bidang Data dan Informasi Kepala Suku Dinas	Dinas Dukacapi DKI Jakarta, Suku Dinas
					Penyediaan Profil Kependudukan		Terselenggaranya Penyediaan Profil Kependudukan	Jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun tepat waktu	Dasar Hukum: 1. Berdasarkan Permendagri No.65 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Definisi: Laporan profil kependudukan merupakan pengumpulan, analisis dan penyajian data provinsi DKI Jakarta Formula Pengukuran: Jumlah laporan profil kependudukan yang tersusun tepat waktu Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	NA	NA	NA	7	7	Ketua Sub Kelompok Pengelolaan Data Vital Kasi Data, Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukacapi DKI Jakarta, Suku Dinas

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					KUALITAS IKU				Bobot IKU	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD	
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)				Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)	TW I	TW II	TW III	TW IV			TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
						Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyek kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tertaksananya Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyek kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyek kependudukan serta Kebutuhan Lain	Dasar Hukum : 1. Berdasarkan Permendagri No.65 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan profil perkembangan kependudukan 2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Definisi : Dokumen penyusunan profil data perkembangan dan proyek merupakan perkiraan atau estimasi masa depan mengenai jumlah penduduk, komposisi usia, jenis kelamin, dan distribusi geografis suatu wilayah atau negara berdasarkan asumsi tertentu mengenai tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan migrasi. Formula Pengukuran : Jumlah Dokumen Penyusunan profil Data Perkembangan dan Proyek kependudukan serta Kebutuhan Lain yang tersusun Sumber Data :	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	7	7	Ketua Sub Kelompok Pengelolaan Data Vital Kasi Data, Informasi dan Pengawasan	Sekolah Wilayah Dinas Dukcapil DKI Jakarta
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			Tercapainya instansi/ lembaga yang menggunakan data kependudukan	Persentase instansi/ lembaga pengguna data kependudukan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Definisi : Mengukur Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan(agregat, database dan verifikasi data) oleh lembaga/ instansi pengguna data Formula Pengukuran : Instansi pengguna data penduduk / target instansi pengguna data sebanyak 140 instansi x 100% Sumber Data : Dokumen Pemohonan Pemanfaatan Data	Outcome	Persentase	Maximize	Take Last Known	Raw Data	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	93	94	95	96.43	96.43	Kepala Bidang Data dan Informasi Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan Kepala UPAK	Dinas Dukcapil DKI Jakarta
					Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Meningkatnya Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pelaksanaan pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Definisi : Penyelenggaraan pengelolaan administrasi kependudukan meliputi pembinaan dan pengawasan terkait administrasi kependudukan Formula Pengukuran : Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang terlaksana / Jumlah pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang direncanakan x 100% Sumber Data :	Immediate Outcome	Persentase	Maximize	Take Last Known	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil DKI Jakarta
					Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Tertaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Definisi : Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan meliputi pemanfaatan data kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal Formula Pengukuran : Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Sumber Data :	Output	Dokumen	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	1	1	2	1	5	Ketua Sub Kelompok Pemanfaatan Data	Dinas Dukcapil DKI Jakarta
					Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Tertaksananya Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Definisi : Laporan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang memuat kegiatan berbagi informasi dan merumuskan solusi terhadap berbagai masalah dan tantangan yang terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan Formula Pengukuran : Jumlah Dokumen Hasil Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	3	3	3	3	12	Kasubag TU UPAK	UPT
					Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi		Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Persentase dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang tersedia	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Definisi : Proses dan kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pengelolaan, dan pemanfaatan data dan informasi yang berkaitan dengan populasi atau penduduk Formula Pengukuran : Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang tersedia / Jumlah dokumen Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang direncanakan x 100% Sumber Data :	Immediate Outcome	Persentase	Maximize	Average	Average	Exact	High		Cascading	Indirect	100	100	100	100	100	Kepala Bidang Data dan Informasi Kepala Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Administrasi Kependudukan	Dinas Dukcapil DKI Jakarta
					Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Tertaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Definisi : Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Formula Pengukuran : Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Sumber Data :	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	3	3	3	3	12	Ketua Sub Kelompok Pembinaan	Dinas Dukcapil DKI Jakarta
					Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan		Tertaksananya Bimbingan teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dasar Hukum: Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Definisi : Upaya untuk memberikan panduan, pelatihan, dan saran kepada petugas atau pejabat pemerintah yang terlibat dalam administrasi kependudukan Formula Pengukuran : Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Orang	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	50	50	Ketua Sub Kelompok Analisa dan Pemutakhiran Data	Dinas Dukcapil DKI Jakarta

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					KUALITAS IKU					Bobot IKU	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PDI / UKPD						
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI I	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Proxy / Activity)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)				TW I	TW II	TW III	TW IV	TAHUNAN								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)						
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				Indeks Kepuasan Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dasar Hukum : Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Definisi : Survey kepuasan layanan penunjang urusan pemerintahan daerah adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara Pemerintah Daerah dengan menggunakan indikator dan metodologi survei yang sudah ditentukan Formula Pengukuran : Memperdomani Permenpan No 14 Tahun 2017. Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Nilai 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survei 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Nilai 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survei 1,00-2,5996 atau nilai interval konversi 25,00-64,99 Sumber Data : Hasil Pengukuran dari kegiatan (Survey)	Outcome	Indeks	Maximize	Average	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	4	4	4	4	4								Sekretaris Kepala UPT Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Definisi: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan mengintegrasikan sistem perencanaan strategis, penganggaran, dan akuntansi pemerintahan. Formula Pengukuran: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang tersedia dibandingkan dengan jumlah dokumen perencanaan yang direncanakan x 100% Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Persentase	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	100	100					Sekretaris	Dinas Dukcapil DKI Jakarta			
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perangkat Daerah Dasar Hukum: Peraturan Gubernur DKI Jakarta yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah diatur dalam beberapa peraturan, termasuk Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Definisi: Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja birokrasi dengan mengintegrasikan sistem perencanaan strategis, penganggaran, dan akuntansi pemerintahan. Formula Pengukuran: Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	1	1					Ketua Sub Kelompok Perencanaan dan Anggaran	Dinas Dukcapil DKI Jakarta			
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Meningkatnya Layanan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Dasar Hukum: 1.Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 2.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 3.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 4.Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2020 Tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana 5.P-DPA-SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 100/P-DPA/2023 Tanggal 04 Juli 2023 Definisi : Hasil Survei Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan yang dilakukan kepada Penerima Layanan dengan mengisi kuesioner dengan memperdomani Permenpan No 14 Tahun 2017 Formula Pengukuran : Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Nilai 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survei 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Nilai 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survei 1,00-2,5996 atau nilai interval	Immediate Outcome	Indeks	Maximize	Take Last Known	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	4	4	4	4	4							Sekretaris Kepala UPT Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Tertaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Dasar Hukum: 1.Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 2.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 3.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 4.Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2020 Tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana 5.P-DPA-SKPD Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 100/P-DPA/2023 Tanggal 04 Juli 2023 Definisi : ASN yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap bulan selama satu tahun. Formula Pengukuran : Jumlah ASN yang menerima pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN tepat waktu dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku setiap bulan selama satu tahun Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Orang / Bulan	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	350	350	350	350	350							Kasubag Kepegawaian	Dinas Dukcapil DKI Jakarta	

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					KUALITAS IKU					Bobot IKU	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PDI/UKPD				
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)	KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)				TW I	TW II	TW III	TW IV	TAHUNAN						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)				
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tertelaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dasar Hukum: 1.Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 2.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 3.Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 142 Tahun 2013 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 4.Keputusan Gubernur Nomor 1119 Tahun 2020 Tentang Pejabat yang Diberi Wewenang Untuk dan Atas Nama Gubernur Menandatangani Surat Penyediaan Dana 5.P-DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor 100/P-DPA/2023 Tanggal 04 Juli 2023 Definisi : Dokumen yang meliputi seluruh proses Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan, antara lain : materi, buku cek dan biaya administrasi bank. Formula Pengukuran : Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersedia Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Dokumen	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	9	9	9	9	9				Kasubag Keuangan Kasi Data Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT	
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Meningkatnya Layanan Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	Dasar Hukum: Undang - Undang RI No.05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Definisi : Hasil Survei Kepuasan Layanan Administrasi Kepegawaian yang dilakukan kepada Penerima Layanan dengan mengisi kuesioner dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 Formula Pengukuran : Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Nilai 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survei 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Nilai 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5996 atau nilai interval konversi 25,00-64,99 Sumber Data : Hasil Pengukuran dari kegiatan (Survey)	Immediate Outcome	Indeks	Maximize	Average	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	4	4	4	4	4					Sekretaris Kepala UPT Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Tertelaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Penyediaan Pakaian Dinas PULP beserta Atribut kelengkapannya Formula Pengukuran : Jumlah Paket Penyediaan Pakaian Dinas ASN dan Non ASN Beserta Atribut Kelengkapannya yang tersedia Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Paket	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	9	9			Kasubag Umum Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah		Meningkatnya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum	Dasar Hukum : Indeks Kepuasan Masyarakat mengacu pada Permen PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Definisi : Hasil Survei Kepuasan Layanan Administrasi Umum yang dilakukan kepada Penerima Layanan dengan mengisi kuesioner dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 Formula Pengukuran : Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Nilai 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survei 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Nilai 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5996 atau nilai interval konversi 25,00-64,99 Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Indeks	Maximize	Average	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	4	4	4	4	4					Sekretaris Kepala UPT Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tertelaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Penyediaan Pemenuhan Kebutuhan Alat Tulis Kantor dalam rangka pelaksanaan Operasional Kantor selama 12 Bulan, meliputi : Toner, ATK (kertas, pensil, spidol, ballpoint, binder clip, map folio, post it, lakban, Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi (flash disk, DVD/ DVD RW, modem wifi), dan Alat Tulis Kantor Lainnya. Formula Pengukuran : Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Paket	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	29	29					Kasubag Umum Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Tertelaksananya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi : Penyediaan peralatan rumah tangga yang merupakan barang pakai habis meliputi : Alat Rumah Tangga Kantor, antara lain: piring, cangkir, gelas, sendok, garpu dan peralatan rumah tangga lainnya. Formula Pengukuran : Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang tersedia Sumber Data : Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Paket	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	6	6					Kasubag Umum	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					KUALITAS IKU		Bobot IKU	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PDI / UKPD			
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)				KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)	TW I	TW II			TW III	TW IV	TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tertindakannya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, meliputi : a. Penyediaan Makanan dan Minuman Pegawai, antara lain : Makanan dan Minum Lembur untuk pegawai dengan jam kerja 24 Jam, Air Galon, Teh, Kopi Formula Pengukuran: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan yang tersedia Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Paket	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	9	9	9	9	36	Kasubag Keuangan	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tertindakannya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan, meliputi : 1. cetakan umum, 2. cetakan khusus, 3. belanja percetakan dan 4. belanja fotocopy. Formula Pengukuran: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Paket	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	8	8	Kasubag Umum, Kas Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
						Penyediaan Bahan/Material	Tertindakannya Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Penyediaan Bahan/Material meliputi Penyediaan BBM KDO dan Bahan/Material lainnya. Formula Pengukuran: Jumlah Paket Bahan/Material yang tersedia Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Paket	Maximize	sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	9	9	9	9	36	Kasubag Umum	Dinas Dukapil Suku Dinas UPT
						Facilitasi Kunjungan Tamu	Tertindakannya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Fasilitas Kunjungan Tamu berupa Penyediaan Makanan dan Minuman untuk tamu yang tidak terprediksi. Formula Pengukuran: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu yang tersusun Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	3	3	3	3	12	Kasubag Keuangan	Dinas Dukapil Suku Dinas UPT
						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tertindakannya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Formula Pengukuran: Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang tersusun Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Dokumen	Maximize	Average	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	1	1	1	1	1	Kasubag TU UPTIK	UPT
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Hasil Survei Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan kepada Penerima Layanan dengan mengisi kuesioner dan Survei dapat digabung dengan beberapa survei lainnya dengan memedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 Formula Pengukuran: Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Nilai 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survei 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Nilai 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5996 atau nilai interval konversi 25,00-64,99 Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Immediate Outcome	Indeks	Maximize	Average	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	4	4	4	4	4	Sekretaris Kepala UPT Kepala Sudin	Dinas Dukapil Suku Dinas UPT	
					Pengadaan Mebel	Tertindakannya Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Melengkapi kebutuhan interior dan perlengkapan pendukung dan fasilitas kerja bagi ASN. Pengadaan mebel meliputi Rak buku, Kursi dan Meja rapat. Formula Pengukuran: Jumlah Paket Mebel yang Tersedia Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Paket	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	4	4	Kasubag Umum, Kas Data, Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukapil Suku Dinas UPT	
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertindakannya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Pengadaan peralatan dan mesin lainnya meliputi laptop, mesin absensi, wireless microphone. Formula Pengukuran: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Tersedia Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Unit	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	1210	1210	Kasubag Umum Kas Data, Informasi dan Pengawasan Kasubag TU UPT	Dinas Dukapil Suku Dinas UPT	

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					KUALITAS IKU		Bobot IKU	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PDI / UKPD			
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)				KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Proxy / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Moderate / High)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)	TW I	TW II			TW III	TW IV	TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan meliputi ac split, pompa air, drain cleaner Formula Pengukuran: Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia Sumber Data: Kasubag Umum Kasi Data, Informasi dan Pengawasan	Output	Unit	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	52	52	Kasubag Umum Kasi Data, Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Hasil Survei Kepuasan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan kepada Penerima Layanan dengan mengisi kuesioner dan Survei dapat digabung dengan beberapa survei lainnya dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 Formula Pengukuran: Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Nilai 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survei 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Nilai 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5996 atau nilai interval konversi 25,00-64,99 Sumber Data: Kasubag Umum Kasi Data, Informasi dan Pengawasan	Immediate Outcome	Indeks	Maximize	Average	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	4	4	4	4	4	Sekretaris Kepala UPT Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tertaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa caraka Formula Pengukuran: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang tersedia Sumber Data: Kasubag Umum Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	24	24	24	24	96	Kasubag Umum Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tertaksananya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Laporan pembayaran tagihan rutin atau biaya langganan TALI setiap bulan selama 1 tahun berupa Tagihan telepon kantor. Formula Pengukuran: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia Sumber Data: Kasubag Umum Kasi Data Informasi dan Pengawasan	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	5	5	5	5	20	Kasubag Keuangan Kasi Data Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukcapil Suku Dinas
						Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tertaksananya Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa mesin fotocopy Formula Pengukuran: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia Sumber Data: Kasubag Umum Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	8	8	8	8	32	Kasubag Umum Kasi Pelayanan Pencatatan Sipil Kasubag TU UPT	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tertaksananya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Penyediaan jasa pelayanan umum kantor meliputi PJP/LP Kebersihan, Keamanan, Mekanikal Elektrik (Teknisi), Supir Formula Pengukuran: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia Sumber Data: Kasubag Umum Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Output	Laporan	Maximize	Sum	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	18	18	18	18	72	Kasubag Umum Kasi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dinas Dukcapil Suku Dinas
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Hasil Survei Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilakukan kepada Penerima Layanan dengan mengisi kuesioner dan Survei dapat digabung dengan beberapa survei lainnya dengan mempedomani Permenpan No 14 Tahun 2017 Formula Pengukuran: Nilai 4 : Sangat Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,5324-4,00 atau nilai interval konversi 88,31-100,00 Nilai 3 : Baik, dengan nilai interval hasil survei 3,0644-3,532 atau nilai interval konversi 76,61-88,30 Nilai 2 : Kurang baik, dengan nilai interval hasil survei 2,60-3,064 atau nilai interval konversi 65,00-76,60 Nilai 1 : Tidak baik, dengan nilai interval hasil survey 1,00-2,5996 atau nilai interval konversi 25,00-64,99 Sumber Data: Kasubag Umum Kasi Data, Informasi dan Pengawasan	Immediate Outcome	Indeks	Maximize	Average	Average	Exact	Moderate		Cascading	Indirect	4	4	4	4	4	Sekretaris Kepala UPT Kepala Sudin	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT

TUJUAN RPD	SASARAN RPD	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KINERJA					KUALITAS IKU		Bobot IKU	Jenis Cascading SS dan IKU (Cascading / non-Cascading)	Proses Cascading (Metode Cascading Direct / Metode Indirect)	TARGET					PENANGGUNG JAWAB INDIKATOR	PD/ UKPD			
							SASARAN	INDIKATOR	META INDIKATOR	LEVEL INDIKATOR	SATUAN	POLARISASI	KONSOLIDASI PERIODE (Sum / Average / Take Last Known)				KONSOLIDASI LOKASI (Sum / Average / Raw Data)	Tingkat Validitas IKU (Exact / Proxy / Activity)	Tingkat kendali IKU (Low / Moderate / High)	TW I	TW II			TW III	TW IV	TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(26)
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tertaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional, meliputi : a. Jasa Pemeliharaan dan Biaya Pemeliharaan dilaksanakan dalam rangka menjaga kondisi kendaraan laik fungsi, b. Penuhnan biaya Jasa KIR, biaya pengurusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BENKB), biaya STNK, biaya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Formula Pengukuran: Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Unit	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	305	305	Kasubag Umum	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Memperpanjang nilai guna dan ekonomis suatu mesin, serta mengupayakan agar mesin dan alat produksi lainnya bisa selalu beroperasi seoptimal mungkin sesuai dengan yang dibutuhkan, pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi: Formula Pengukuran: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Unit	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	1144	1144	Kasubag Umum	Dinas Dukcapil Suku Dinas UPT
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan meliputi fumigasi dan penyemprotan untuk pengendalian pest control & rodent control Formula Pengukuran: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Unit	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	5	5	Kasubag Umum Kasi Data Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukcapil Suku Dinas
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya meliputi: Pemeliharaan rutin genset, cubical panel, door sensor multi beam, guide roller, IPAL, pemeliharaan lift dll Formula Pengukuran: Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Unit	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	5	5	Kasubag Umum Kasi Data Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukcapil Suku Dinas
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tertaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dasar Hukum: Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Definisi: Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya meliputi pemeliharaan ac dan digital signage display Formula Pengukuran: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Sumber Data: Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Output	Unit	Maximize	Take Last Known	Sum	Exact	High		Cascading	Indirect	N/A	N/A	N/A	6	6	Kasubag Umum Kasi Data Informasi dan Pengawasan	Dinas Dukcapil Suku Dinas

Jakarta, 20 September 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta



Budi Auluddin
NIP. 197801171997111001